



INSPEKTORAT
Insight To Navigate The Future

LAPORAN KINERJA 2023

NOMOR : OT.00.04/LKIN-002/IN/4/2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat BPKP telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan 9 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 9 sasaran kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2023, seluruhnya berhasil mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **106,01%**, dengan ringkasan kinerja berikut ini:

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal

104,65%

Persentase Tindak Lanjut atas Saran atau Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP

100,00%

Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP

100,58%

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan MR Unit Kerja yang Ditindaklanjuti

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan

100,90%

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara

100,00%

Persentase ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHKPN/LHKASN)

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP

133,33%

Indeks IEPK BPKP

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan

100,00%

Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016

SASARAN KEGIATAN 8

Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat

101,75%

Skor Kapabilitas Inspektorat

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat

108,20%

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

117,11%

Persentase BMN dalam Kondisi Baik

142,42%

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

104,34%

Skor IKPA Unit Kerja

105,06%

Nilai SAKIP

100,00%

Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

FAKTOR PENDUKUNG

Tercapainya seluruh sasaran kegiatan pada Inspektorat tidak lepas dari komitmen pimpinan dan pegawai, kerja sama yang baik antara Inspektorat dengan Klien dan/atau Entitas Mitra, serta pembekalan kompetensi yang cukup kepada pegawai dalam melaksanakan penugasan.

KINERJA LAINNYA

Kinerja

1. Aplikasi Penanganan Pengaduan
2. Studi Banding dan *Sharing Knowledge* dengan K/L/P Lain
3. Telaah Sejawat Eksternal ke BSSN
4. Persentase TL Rekomendasi BPK

Penghargaan

1. IKPA Terbaik Semester I Tahun 2023
2. Sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2016
3. Unit Pengolah Arsip dengan Kategori "Sangat Baik"
4. Juara 2 *Best Performance* Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tahun 2024, Inspektorat BPKP akan **meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan lini kedua dan unit kerja BPKP yang menjadi Klien dan/atau Entitas Mitra Inspektorat**. Selanjutnya, upaya **peningkatan kompetensi akan lebih intensif** dilakukan dengan memperhatikan gap kompetensi dan kebutuhan kompetensi sesuai dengan kompleksitas penugasan agar Inspektorat mampu memberikan rekomendasi strategis dan *early warning* dalam setiap penugasan pengawasan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat BPKP Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh *stakeholders* dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Pelaporan ini juga selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, agar setiap instansi pemerintah menyusun dan menyampaikan LKj sesuai ketentuan yang berlaku. LKj ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor OT.04/S-2009/SU/01/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023.

Sebagai lini ketiga di lingkungan BPKP, Inspektorat BPKP telah melakukan berbagai jenis kegiatan pengawasan intern yang telah direncanakan baik berupa jasa asurans maupun jasa konsultansi.

Pengawasan tersebut memenuhi amanah Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pasal 122 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP.

Inspektorat BPKP melakukan berbagai inovasi dan adaptasi untuk menjaga kinerja pengawasan BPKP tetap efektif dan bermanfaat berkelanjutan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja atas tugas dan fungsi Inspektorat BPKP tahun 2023, seluruh sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2023 telah tercapai.

Jakarta, 5 Januari 2024

Inspektur,
Buntoro

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif _____	iii
Kata Pengantar _____	vi
Daftar Isi _____	vii
Daftar Tabel _____	viii
Daftar Grafik _____	ix
Daftar Lampiran _____	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi _____	1
B. Struktur Organisasi _____	3
C. Isu-isu Strategis Organisasi _____	5
D. Sistematika Laporan _____	5

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

A. Target Kinerja Tahun 2020-2024 _____	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 _____	9
C. Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 _____	12

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja _____	14
B. Capaian Kinerja <i>Outcome</i> _____	14
C. Capaian Kinerja <i>Output</i> _____	42
D. Akuntabilitas Keuangan _____	42
E. Analisis Efisiensi _____	44
F. Kinerja APEP _____	44
G. Kinerja Lainnya _____	45

BAB IV: PENUTUP

Penutup _____	48
Kilas Balik Peristiwa _____	49
Lampiran _____	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target IKK Inspektorat BPKP Tahun 2020-2024	8
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Kepala BPKP Tahun 2023	9
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Agenda Prioritas <i>Enabler</i> Pengawasan Inspektorat BPKP Tahun 2023	10
Tabel 2.4.	<i>Grand Strategy Enabler</i> Inspektorat BPKP Tahun 2023	11
Tabel 2.5.	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
Tabel 3.1.	Ringkasan Kinerja Inspektorat Tahun 2023	15
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1	16
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 2	18
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 3	20
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 4	22
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 5	24
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 6	26
Tabel 3.8.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 7	28
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 8	30
Tabel 3.10.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 9	33
Tabel 3.11.	Risiko Utama Sasaran Kegiatan	41
Tabel 3.12.	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Sasaran Kegiatan	42
Tabel 3.13.	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Jenis Belanja	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 1.1 Tahun 2020-2023	17
Grafik 3.2.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 2.1 Tahun 2020-2023	19
Grafik 3.3.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 3.1 Tahun 2020-2023	21
Grafik 3.4.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 4.1 Tahun 2020-2023	23
Grafik 3.5.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 5.1 Tahun 2020-2023	25
Grafik 3.6.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 6.1 Tahun 2020-2023	27
Grafik 3.7.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 7.1 Tahun 2020-2023	29
Grafik 3.8.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 8.1 Tahun 2020-2023	32
Grafik 3.9.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.1 Tahun 2020-2023	34
Grafik 3.10.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.2 Tahun 2020-2023	35
Grafik 3.11.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.3 Tahun 2020-2023	37
Grafik 3.12.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.4 Tahun 2020-2023	38
Grafik 3.13.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.5 Tahun 2020-2023	39
Grafik 3.14.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.6 Tahun 2020-2023	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Target dan Realisasi <i>Outcome</i> Inspektorat BPKP Tahun 2023	52
Lampiran II	Perbandingan Realisasi <i>Outcome</i> Inspektorat BPKP Tahun 2023	54
Lampiran III	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK) Inspektorat BPKP Tahun 2023	55
Lampiran IV	Perbandingan Realisasi Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK) Inspektorat BPKP Tahun 2023	57
Lampiran V	Realisasi Kinerja Agenda Prioritas <i>Enabler</i> Pengawasan Inspektorat BPKP Tahun 2023	59



PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Inspektorat BPKP disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh *stakeholders*. Laporan ini untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat BPKP Tahun 2023.

Tugas dan fungsi Inspektorat BPKP, struktur organisasi, aspek dan isu strategis organisasi, dan sistematika penyajian laporan diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas dan Fungsi

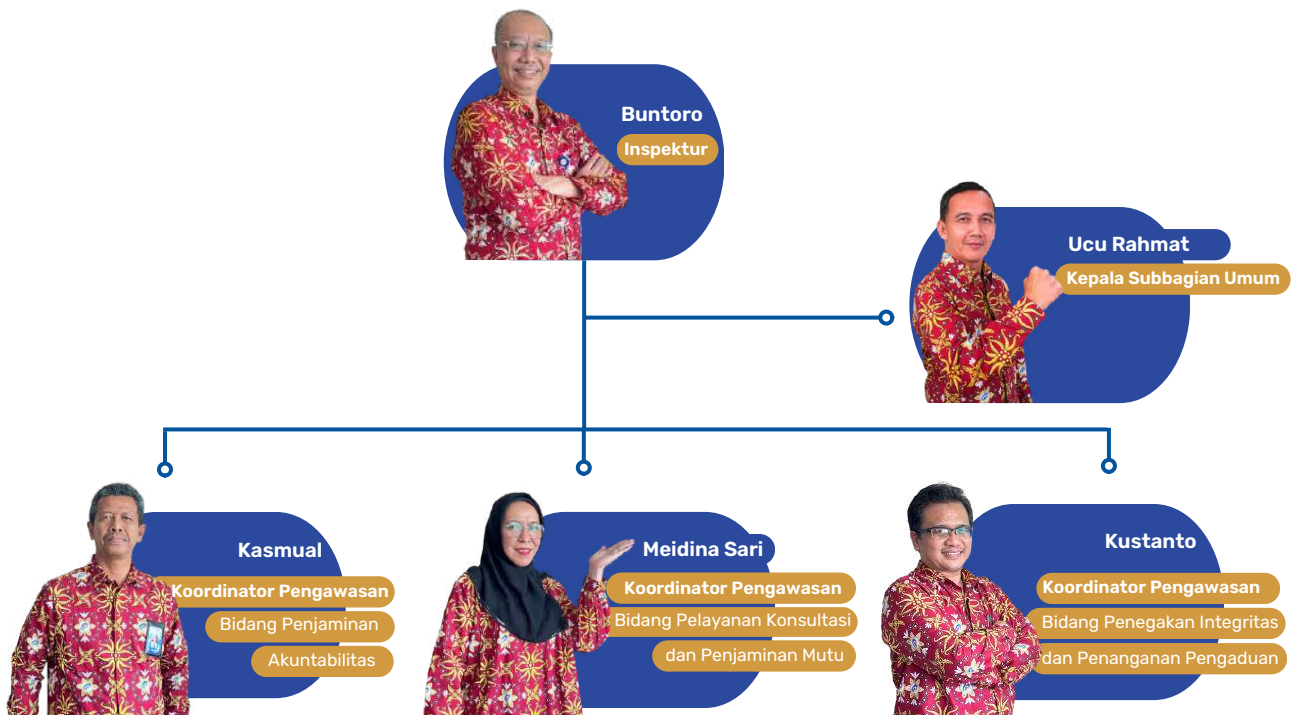
Sesuai Peraturan BPKP Nomor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat;
2. Penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
3. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
4. Pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
5. Pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
6. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
8. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPKP;
9. Pemantauan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan intern dan ekstern di lingkungan BPKP;
10. Penjaminan kualitas program, proyek, dan kegiatan di lingkungan BPKP;

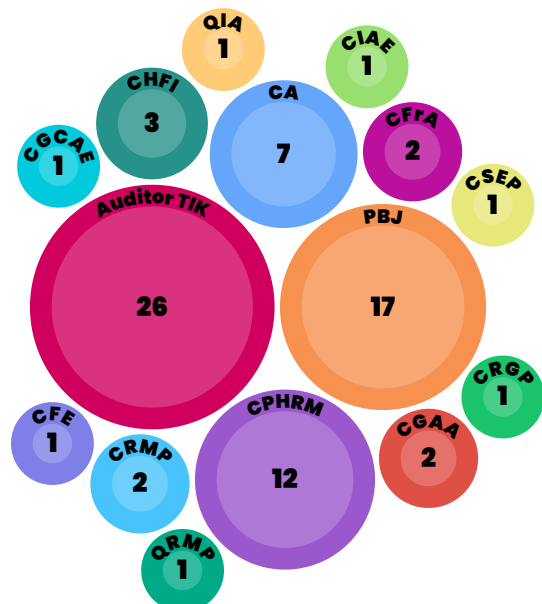
11. Pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPKP terkait tugas Inspektorat;
12. Pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program, proyek atau kegiatan di lingkungan BPKP;
13. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;
14. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat;
15. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat; dan
16. Kegiatan pengawasan intern lainnya yang ditugaskan Kepala BPKP.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP pasal 30 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Inspektorat BPKP dipimpin oleh seorang Inspektur dan merupakan unsur pengawas intern BPKP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama BPKP. Pejabat di lingkungan Inspektorat BPKP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur BPKP dibantu seorang Kepala Subbagian Umum, tiga Koordinator Pengawasan, 37 Pejabat Fungsional Auditor dan delapan Fungsional Umum, dengan profil sertifikasi seperti ditunjukkan pada diagram di samping:



PROFIL INSPEKTORAT

Kasmual

Koordinator Pengawasan

Bidang Penjaminan Akuntabilitas



- Melaksanakan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
- Melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
- Melaksanakan reviu atas laporan keuangan BPKP;
- Melaksanakan reviu rencana kerja dan anggaran BPKP;
- Melaksanakan reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta konten lokal;
- Melaksanakan reviu rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN); dan
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan BPKP.

Meidina Sari

Koordinator Pengawasan

Bidang Pelayanan Konsultasi

dan Penjaminan Mutu



- Melaksanakan *monitoring* pelaksanaan *Internal Audit Capability Model (IACM)* di Inspektorat dan di BPKP;
- Melaksanakan penjaminan kualitas program, proyek, dan kegiatan di lingkungan BPKP;
- Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- Melakukan fasilitasi manajemen Risiko di lingkungan BPKP.

Kustanto

Koordinator Pengawasan

Bidang Penegakan Integritas

dan Penanganan Pengaduan



- Melaksanakan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit dan pegawai di lingkungan BPKP;
- Melakukan pengawasan atas kepatuhan penyampaian LHKAN;
- Melakukan pengawasan adanya gratifikasi;
- Mengelola sistem *Whistleblowing*;
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
- Melakukan pengawasan adanya benturan kepentingan.

Ucu Rahmat

Kepala Subbagian Umum



- Mengoordinasikan dan mengelola urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha BMN, dan umum Inspektorat;
- Mengoordinasikan dan mengelola urusan tata usaha pengawasan dan hasil pengawasan, serta program dan pelaporan Inspektorat;
- Mengoordinasikan dan mengelola urusan kearsipan Inspektorat;
- Melaksanakan tugas sebagai tim penilai angka kredit;
- Melaksanakan tugas kesekretariatan Tim PP 30 Pusat;
- Pengelola Humas dan *Website* Inspektorat;
- Membuat Laporan Bulanan RKT, Efisiensi, SIM-HP, Realisasi Anggaran, GDN, Kinerja, Kinerja Keuangan, PKS, Budaya Kerja, dan LKj.

C. ASPEK ATAU ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

BPKP telah melakukan transformasi pengawasan menjadi lebih *agile* dan adaptif terhadap lingkungan strategis pemerintah selama empat tahun terakhir. Hasil pengawasan BPKP telah memberikan kontribusi yang nyata dalam perubahan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kualitas hasil pengawasan merupakan hal yang krusial bagi BPKP.

BPKP telah melakukan upaya perbaikan internal, mulai dari kebijakan, pengelolaan kompetensi auditor, pengelolaan akuntabilitas kinerja, dan infrastruktur pendukung pengawasan. Perbaikan internal dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan BPKP.

Inspektorat sebagai APIP memiliki peran untuk memastikan kegiatan unit *enabler* telah dilakukan dengan tepat untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan memastikan unit teknis BPKP dapat menghasilkan pengawasan yang berkualitas.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat BPKP mengacu pada Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor OT.04/S-2009/SU/01/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

2. KATA PENGANTAR

3. BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai penjelasan umum tentang Inspektorat BPKP, aspek/isu strategis menjadi perhatian, dan sistematika penyajian laporan kinerja.

4. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

5. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian rinci capaian kinerja *outcome*, *output*, anggaran dan agenda prioritas *enabler* pengawasan.

6. BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan capaian kinerja, faktor pendukung, dan rencana tindak ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja.

7. LAMPIRAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB II



PERENCANAAN KINERJA



A. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, Inspektorat BPKP sebagai salah satu unit penjaminan kualitas mendukung sasaran program Pengawasan Pembangunan dalam mencapai visi dan misi BPKP. Untuk mendukung sasaran program tersebut, Inspektorat BPKP menetapkan enam Sasaran Kegiatan utama dengan delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Disamping itu, Inspektorat BPKP memiliki kegiatan dukungan manajemen internal dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Inspektorat” yang diukur keberhasilannya dengan 12 IKK.

Target dan IKK atas enam sasaran kegiatan utama dan satu sasaran kegiatan dukungan tersebut dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1.
Target IKK Inspektorat BPKP Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
A Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal							
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan Internal BPKP	Nilai Area Pengawasan pada Indeks RB	9,43	9,57	9,71	9,85	9,99
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Level IACM Inspektorat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Persentase Temuan Lalu yang Tidak Berulang	25	25	25	25	25
4.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP	Unit Kerja Kategori Minimal BB	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal	Peningkatan Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Peningkatan Maturitas MR	-	3,0	3,5	3,7	4,0
6.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Unit Kerja Percontohan	Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	60	65	70	75	80
B Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Inspektorat							
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Inspektorat	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	-	76	77	78	79
		Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	86	87	88	89	90
		Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu	90%	91%	92%	93%	95%
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri)	1	1	1	1	1
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Nilai SAKIP Unit Kerja	80	81	82	83	84
		Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks MR Unit Kerja	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	70	76	80	81	82

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2023 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP” pada Perjanjian Kinerja, yang semula terdiri dari dua IKK menjadi satu IKK yaitu “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Risiko Unit Kerja yang Ditindaklanjuti”. Sehingga target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menjadi delapan indikator kinerja utama dan enam indikator kinerja dukungan pengawasan dengan rincian target sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Kepala BPKP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	1.1	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance	Persen	70
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP	2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Persen	100
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP	3.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Persen	35
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan	4.1	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM	Persen	75
5	Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara	5.1	Persentase ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHKPN/LHKASN)	Persen	100
6	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP	6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan	7.1	Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016	Persen	100
8	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	8.1	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat	9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85
		9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor	95
		9.3	Persentase BMN dalam Kondisi Baik	Persen	80
		9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81
		9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Internal (SPIP Unit Kerja)	Persen	70
		9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100

Pada tahun 2023, selain perjanjian kinerja dengan target capaian *outcome* sasaran kegiatan, terdapat juga perjanjian kinerja Agenda Prioritas *Enabler* Pengawasan (APEP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Agenda Prioritas *Enabler* Pengawasan
Inspektorat BPKP Tahun 2023

No	Kode	Tema	Topik	Target Pelaporan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	B.6	Manajemen kinerja	Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPKP	√	-	-	√
2	B.7	Manajemen kinerja	Pengawasan Intern atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	√	-	-	√
3	B.8	Manajemen kinerja	Prioritasi penggunaan anggaran	√	-	-	√
4	C.6	Metodologi dan Data	Pengelolaan Risiko	√	√	√	√
5	E.2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	-	-	-	√

Pada bulan Maret Tahun 2023, Sekretariat Utama menerbitkan *Grand Strategy Enabler* (GSE) yang menjadi target tambahan pengawasan Inspektorat BPKP. Berdasarkan Laporan Kegiatan Pembahasan Rencana Aksi atas Agenda Prioritas *Enablers* Pengawasan dan *Grand Strategy Enablers* BPKP Tahun 2023 dan Kesepakatan Target atas Peran *Enablers* Nomor PE.11/LPP-42/IN/2/2023 tanggal 15 Maret 2023, Inspektorat menjadi penanggungjawab strategi taktis sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Grand Strategy Enabler
Inspektorat BPKP Tahun 2023

No	Kode	Strategi Taktis	Indikator
1	#3	Memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan proses bisnis pengawasan sekaligus memastikan implementasi kendali mutu (KM)	Tersedianya informasi hasil pemantauan terhadap efektivitas penerapan proses bisnis dalam kendali mutu
2	#14	Memastikan kepatuhan unit kerja dalam menggunakan BISMA pada proses transaksi keuangan (integrasi BISMA dan Citra)	Tersedianya jumlah unit kerja yang menggunakan BISMA pada proses transaksi keuangan
3	#25	Melakukan pemantauan ketercapaian <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Hasil pemantauan SLA dan tindaklanjutnya
4	#30	Menyusun dan mengimplementasikan daftar risiko serta mitigasinya terkait pelanggaran integritas	Peta risiko pelanggaran integritas penugasan dengan risiko hukum tinggi dan merancang standar mitigasi risiko untuk penugasan tersebut
5	#31	Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi value BPKP dan core value ASN (BerAkhlaq)	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas internalisasi value BPKP dan core ASN beserta tindak lanjutnya
6	#33	Melakukan internalisasi RMIS	Terselenggaranya pemantauan terhadap kepatuhan penerapan RMIS serta tindak lanjutnya
7	#36	Meningkatkan <i>skill</i> komunikasi dan exposure penugasan yang mengharuskan pegawai untuk menginisiasi komunikasi	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas kemampuan <i>skill</i> komunikasi peserta pelatihan
8	#38	Membangun <i>smart workshop</i>	Evaluasi utilitas pemanfaatan <i>smartworkshop</i>

Adapun strategi taktis yang belum disusun rencana aksinya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan SLA (#25)

Rencana aksi atas strategi taktis #25 belum dapat disusun oleh Inspektorat disebabkan SLA yang harus dipantau oleh Inspektorat belum didefinisikan oleh Biro MKOT selaku penanggungjawab indikator penyusun SLA, dan Biro MKOT belum menyusun rencana aksi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.

2. Membangun *smart workshop* (#38)

Rencana aksi atas strategi taktis #38 baru dapat dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan yang tertuang dalam GSE.

C. PERBANDINGAN TARGET KINERJA

Rencana kinerja tahunan Inspektorat BPKP mengalami perubahan sebanyak dua kali sepanjang periode 2020-2023. Sehingga terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2020-2024. Perubahan pertama, pada tahun 2021 sasaran kegiatan dan IKK pada Perjanjian Kinerja 2021 mengalami perubahan dari yang semula enam sasaran kegiatan utama dengan delapan IKK menjadi delapan sasaran kegiatan utama dengan sembilan IKK, serta satu sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan enam IKK.

Perubahan kedua terjadi pada tahun 2023, dari yang semula delapan sasaran kinerja utama dengan sembilan IKK, berubah menjadi delapan sasaran kinerja utama dengan delapan IKK. Perbandingan rencana kinerja Inspektorat Tahun 2023 dengan rencana strategis Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

No.	Renstra 2020-2024			Perkin 2023			Keterangan
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
A	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal						
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan Internal BPKP	Nilai Area Pengawasan pada Indeks RB	9.85	-	-	-	SK dan IKK dihapus
2	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Level IACM Inspektorat	Level 3	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	Skor Kapabilitas APIP	4	IKK dan target disesuaikan dengan perubahan peraturan penilaian kapabilitas APIP
3	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	100	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	70	IKK dilebur menjadi 1, dan target disesuaikan
		Persentase Temuan Lalu yang Tidak Berulang	25				
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP	Unit Kerja Kategori Minimal BB	100	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	100	SK dan IKK disesuaikan dengan tusi Inspektorat
5	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal	Peningkatan Matunitas SPIP	Level 3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	35	SK dan IKK disesuaikan dengan tusi Inspektorat target disesuaikan dengan IKK
		Peningkatan Matunitas MR	3.7				

No.	Renstra 2020-2024			Perkin 2023			Keterangan
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
6	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Unit Kerja Percontohan	Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	75	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	75	IKK disesuaikan dengan tusi Inspektorat
7				Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	100	SK dan IKK tambahan sejak Perkin 2021
8				Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	Indeks IEPK BPKP	3	SK tambahan sejak perkin 2021, sementara IKK disesuaikan dengan kondisi organisasi pada tahun 2022
9				Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	100	SK dan IKK tambahan sejak Perkin 2021
B Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Inspektorat							
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Inspektorat	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	78	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	85	
		Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	100%		-	-	IKK dihapus
		Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%		-	-	IKK dihapus
		Persentase Penyusunan RKA. Tepat Waktu Unit Kerja	100%		-	-	IKK dihapus
		Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	89		Skor IKPA Unit Kerja	95	Target disesuaikan dengan realisasi tahunan
		Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu	93%		-	-	IKK dihapus
		Persentase	1		-	-	IKK dihapus
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Baik		Persentase BMN dalam kondisi baik	80	IKK dan target disesuaikan
		Nilai SAKIP Unit Kerja	83		Nilai SAKIP	85	Target disesuaikan dengan realisasi tahunan
		Maturnitas SPIP Unit Kerja	Level 3		Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	70	IKK dan target disesuaikan
		Indeks MR Unit Kerja	Level 3		Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	100	IKK dan target disesuaikan
Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	81	-	-	IKK dihapus			

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2023 dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang. Data kinerja tersebut berupa target dan realisasi kinerja, uraian rinci kinerja, target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, berbagai penghargaan yang diterima, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Inspektorat BPKP.

B. CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2023

1. RINGKASAN KINERJA

Kinerja Inspektorat tahun 2023 terdiri dari sembilan sasaran kegiatan yang diukur capaiannya dengan 14 IKK. Sasaran tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Sasaran Kegiatan Utama untuk delapan sasaran kegiatan dengan total indikator sebanyak delapan IKK, dan satu Sasaran Kegiatan Dukungan dengan indikator sebanyak enam IKK. Secara rata-rata, capaian kinerja dari seluruh sasaran kegiatan di Inspektorat BPKP tahun 2023 adalah sebesar 106,01%.

a. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Utama

Delapan Sasaran Kegiatan Utama pengawasan memiliki delapan IKK dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan utama pengawasan adalah 105,15%. Dari delapan IKK, seluruhnya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian 100% atau lebih.

b. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan

Satu Sasaran Kegiatan Dukungan manajemen memiliki enam IKK. Rata-rata capaian kinerja kegiatan ini adalah 112,85%. Dari enam IKK, seluruhnya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian 100% atau lebih.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Ringkasan Kinerja Inspektorat Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
I Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Internal						
1.1	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance	Persen	70	73,26	104,65	●
II Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP						
2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	●
III Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal BPKP						
3.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan MR Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Persen	35	35,20	100,58	●
IV Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan						
4.1	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	75,68	100,90	●
V Meningkatkan Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara						
5.1	Persentase ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHKPN/LHKASN)	Persen	100	100,00	100,00	●
VI Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP						
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	4	133,33	●
VII Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengaduan						
7.1	Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016	Persen	100	100	100	●
VIII Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat						
8.1	Skor Kapabilitas Inspektorat	Nilai	4	4,07	101,75	●
IX Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Inspektorat						
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	91,97	108,20	●
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	99,12	104,34	●
9.3	Persentase BMN dalam Kondisi Baik	Persen	80	93,68	117,11	●
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	85,10	105,06	●
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	99,69	142,42	●
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100,00	100,00	●

Keterangan: ● Mencapai/melampaui target
● Belum mencapai target

Informasi lebih jelas tentang ringkasan kinerja dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

2. URAIAN KINERJA

Rincian capaian kinerja tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan diukur dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian 104,65% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
I	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal					
1.1	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance	Persen	70	73,26	104,65	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1					104,65	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan sebagai berikut:

IKK 1.1 Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Tahun 2023 sebesar 73,26% atau mencapai 104,65%

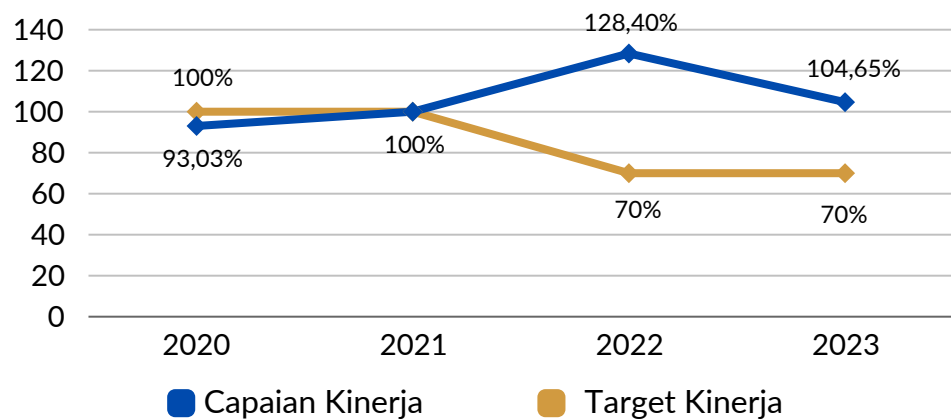
Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah tindak lanjut atas saran atau rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat periode berjalan dibagi jumlah rekomendasi pada periode sebelumnya, dikali 100%.

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat tersebut bersumber dari kegiatan assurance yang meliputi Reviu atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung, Reviu PAPBJ, Monitoring TL atas Hasil Pengawasan BPKP, Monitoring TL atas Temuan BPK, Audit TIK, Reviu PNBPN, Audit Kinerja dan Audit PBJ.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 73,26% atau mencapai 104,65% dari target tahun 2023 sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 89,88% dari target 70%, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 16,62% atau 23,75% dari capaian tahun 2022 sebesar 128,40%.

Penurunan capaian di tahun 2023 disebabkan kurang maksimalnya monitoring tindak lanjut atas saran/rekomendasi hasil pengawasan dan adanya rekomendasi yang baru dapat ditindaklanjuti di tahun 2024. Dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, realisasi indikator ini mencapai 73,26% dari target sebesar 100%.

Perbandingan target dan capaian IKK 1.1 tahun 2020 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 1.1 Tahun 2020-2023

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara triwulanan atas hasil pengawasan yang diinput di SIMHP dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait tindak lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat yang belum ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rentang waktu satu s.d. tiga bulan setelah tanggal laporan, dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

Capaian Sasaran Kegiatan 1 sebesar 104,65% atau telah melampaui target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp758.780.787,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp758.781.000,00, dengan Indikator *Output* Kegiatan (IOK) sebanyak 21 laporan atau 116,67% dari rencana *output* sebanyak 18 laporan, serta kebutuhan OH sebanyak 1.510 OH atau 86,88% dari rencana sebanyak 1.742 OH.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP diukur dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian 100,00% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 2

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
II	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP					
2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100,00	100,00	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2					100,00	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP sebagai berikut:

IKK 2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti

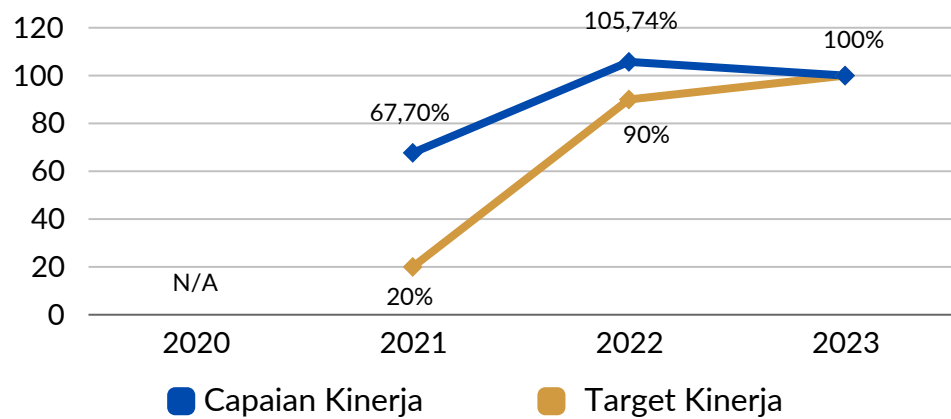
*Realisasi
Persentase
Rekomendasi
Hasil Evaluasi
SAKIP Unit
Kerja yang
Ditindaklanjuti
sebesar
100,00% atau
mencapai
100,00%*

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah saran/rekomendasi sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah rekomendasi sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya, dikalikan 100%.

Realisasi persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari 95 rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sebanyak 95 rekomendasi.

Meskipun capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,74% dari capaian tahun 2022 sebesar 105,74%, namun realisasi persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,83% jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 95,17% dari target 90%.

Perbandingan target dan capaian IKK 2.1 tahun 2020 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 2.1 Tahun 2020-2023

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti belum dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun 2020 maupun target Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan pemantauan yang lebih intensif dan meningkatkan koordinasi dengan Biro MKOT serta unit kerja BPKP atas hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2023.


Capaian Sasaran Kegiatan 2 sebesar 100,00% atau telah mencapai target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp128.358.925,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp128.359.000,00, dengan Indikator Output Kegiatan (IOK) sebanyak 19 laporan atau 126,67% dari rencana output sebanyak 15 laporan, serta kebutuhan OH sebanyak 1.389 OH atau 207,31% dari rencana sebanyak 670 OH.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP diukur dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian 100,58% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 3

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
III	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP					
3.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan MR Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Persen	35	35,20	100,58	
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3					100,58	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP sebagai berikut:

IKK 3.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko Unit Kerja yang Ditindaklanjuti

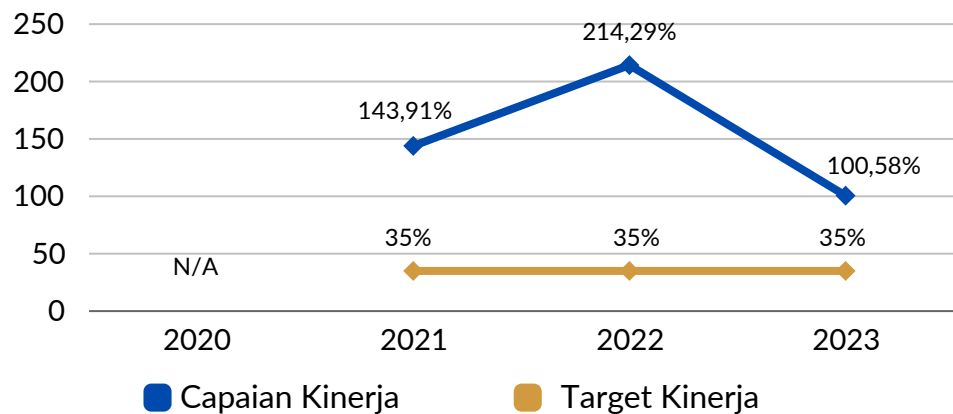
*Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan MR unit kerja yang ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar **35,20%** atau mencapai **100,58%***

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan Manajemen Risiko (MR) yang ditindaklanjuti oleh unit kerja pada triwulan IV tahun sebelumnya s.d triwulan III tahun berjalan, dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan MR triwulan IV tahun sebelumnya s.d triwulan III tahun berjalan, dikali 100%.

Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan MR unit kerja yang ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 35,20% atau mencapai 100,58% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 35%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 138 rekomendasi hasil evaluasi atas penyelenggaraan MR pada unit kerja BPKP tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja BPKP sampai dengan triwulan III tahun 2023 dari total sebanyak 392 rekomendasi.

Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan MR unit kerja yang ditindaklanjuti tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 113,71% dibandingkan tahun 2022 dengan capaian sebesar 214,29% dari target tahun 2022 sebesar 35%. Penurunan capaian indikator kinerja ini disebabkan kurang optimalnya monitoring tindak lanjut dari Inspektorat.



Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 3.1 Tahun 2020-2023

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan MR unit kerja yang ditindaklanjuti belum dapat diperbandingkan dengan target Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro MKOT sebagai lini kedua dan unit kerja BPKP sebagai lini pertama.

Capaian Sasaran Kegiatan 3 sebesar 100,58% atau telah melampaui target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp342.822.323,00 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp403.449.256,00, dengan IOK sebanyak 15 laporan atau 100% dari rencana output sebanyak 15 laporan, serta penggunaan OH sebanyak 931 OH atau 171,14% dari rencana sebanyak 544 OH.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan diukur dengan satu IKK dengan capaian 100,90% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 4

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
IV	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan					
4.1	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	75,68	100,90	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4					100,90	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan sebagai berikut:

IKK 4.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

*Realisasi persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM tahun 2023 sebesar **75,68%** atau mencapai **100,90%***

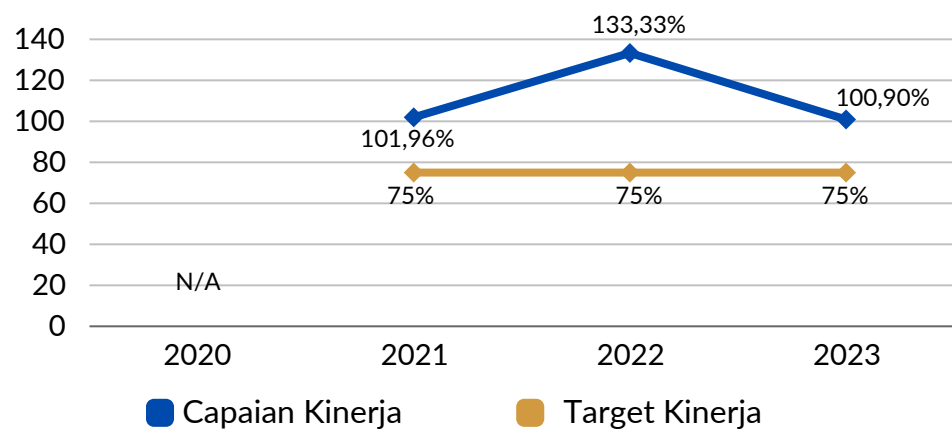
Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM dibagi dengan jumlah unit kerja yang dievaluasi tahun berjalan dikali 100%.

Realisasi persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM tahun 2023 sebesar 75,68% atau mencapai 100,90% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 75%. Capaian indikator diperoleh hasil evaluasi atas penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan BPKP tahun 2023. Dari 37 unit kerja yang wajib dievaluasi tahun 2023, sebanyak 28 unit kerja memenuhi kriteria pengusulan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM.

Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 32,43% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 133,33% dari target tahun 2022 sebesar 75%.

Penurunan capaian kinerja indikator ini antara lain disebabkan oleh perubahan metode evaluasi sebagai berikut:

1. Perhitungan komponen “capaian kinerja lebih baik” menggunakan metode rata-rata seluruh IKK utama hasil dari Biro MKOT, sehingga unit kerja memiliki rata-rata capaian kinerja di atas 100%. Hal tersebut menyebabkan jumlah unit kerja yang dievaluasi lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022; dan
2. Evaluasi yang dilakukan berfokus pada substansi dan dampak pembangunan ZI unit kerja bukan pemenuhan dokumen.



Grafik 3.4. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 4.1 Tahun 2020-2023

Indikator kinerja persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM belum dapat diperbandingkan dengan target Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat selaku TPI untuk mencapai target kinerja indikator ini antara lain:

1. Mengikuti forum diskusi TPI yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
2. Berkoordinasi dengan Biro MKOT selaku pembina pembangunan zona integritas pada unit kerja di lingkungan BPKP;

3. Komunikasi intensif dengan satuan tugas pembangunan zona integritas pada unit kerja yang dievaluasi, serta mengadakan simulasi presentasi unggulan unit kerja yang akan diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM kepada Kementerian PANRB.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini di tahun 2024, Inspektorat akan:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Biro MKOT perihal teknis pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024;
2. Melakukan *monitoring area of improvement* atas hasil evaluasi tahun 2023.

Capaian Sasaran Kegiatan 4 sebesar 100,90% atau telah melampaui target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp106.040.914,00 atau 98,44% dari anggaran sebesar Rp107.722.000,00, dengan IOK sebanyak empat laporan atau 200% dari rencana *output* sebanyak dua laporan, serta penggunaan SDM sebanyak 426 OH atau 200,94% dari rencana sebanyak 212 OH.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara diukur dengan satu IKK dengan capaian rata-rata 100,00% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 5

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
V	Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara					
5.1	Persentase ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHKPN/LHKASN)	Persen	100	100,00	100,00	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5					100,00	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

IKK 5.1

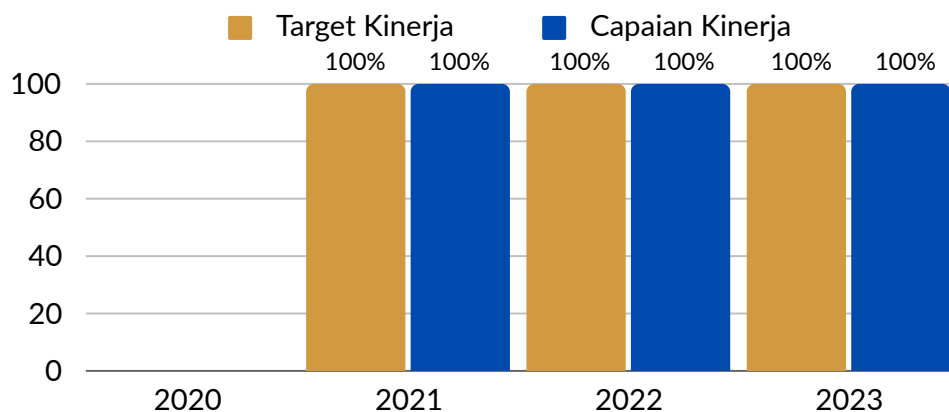
Realisasi Persentase ASN yang melaporkan Harta Kekayaan secara tepat waktu Tahun 2023 sebesar 100%

Persentase ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan Secara Tepat Waktu (LHKPN/LHKASN)

Pada tahun 2023, melalui Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencabut kewajiban penyampaian LHKASN dan menyampaikan bahwa terhadap Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dapat menyampaikan laporan harta kekayaannya melalui SPT Tahunan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan untuk menjamin integritas seluruh Aparatur Negara dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan di aplikasi e-LHKPN dan SPT Tahunan tahun berjalan dibagi jumlah pegawai Wajib Laport tahun berjalan, dikali 100%.

Pada tahun 2023, terdapat 3.655 wajib LHKPN dan 1.798 tidak wajib LHKPN. Seluruhnya telah melaporkan harta kekayaannya secara tepat waktu.

Realisasi persentase ASN yang melaporkan harta kekayaan tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebesar 100%.



Grafik 3.5. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 5.1 Tahun 2020-2023

Persentase ASN yang melaporkan harta kekayaan di aplikasi e-LHKPN dan SPT Tahunan secara tepat waktu tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian 100% untuk indikator ini merupakan capaian optimum.

Selama tahun 2023 Inspektorat telah melakukan pemantauan penyampaian LHKPN di lingkungan BPKP melalui Aplikasi MAP dan berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dalam memonitor penyampaian SPT Tahunan.

Untuk mempertahankan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan menghimbau agar pegawai wajib lapor, melaporkan LHKPN dan SPT Tahunan lebih awal dari batas waktu yang telah ditentukan.

Capaian Sasaran Kegiatan 5 sebesar 100,00% atau telah mencapai target tahun 2023. Capaian tersebut tidak menggunakan realisasi dana karena tidak memiliki pagu anggaran, dengan IOK sebanyak dua laporan atau 100,00% dari rencana *output* sebanyak dua laporan, serta kebutuhan OH sebanyak 60 OH atau 52,17% dari rencana sebanyak 115 OH.

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP diukur dengan satu IKK dengan capaian 133,33% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 6

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
VI	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP					
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	4	133,33	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6					133,33	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP sebagai berikut:

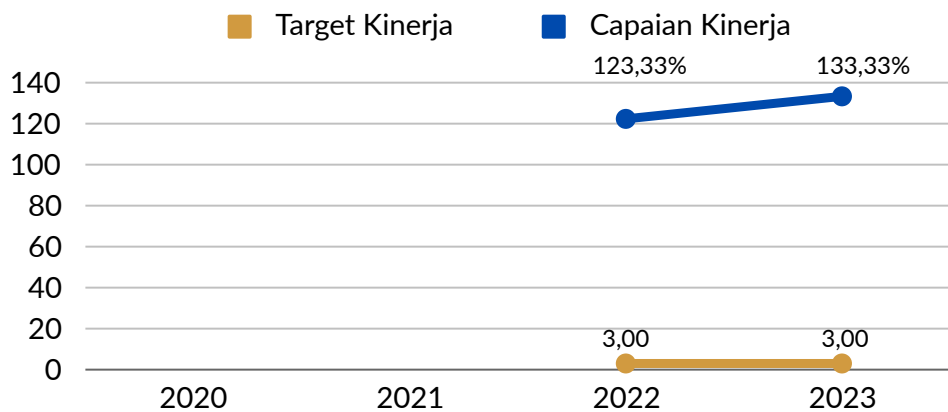
IKK 6.1

Realisasi Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi BPKP Tahun 2023 sebesar 4 atau mencapai **133,33%**

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) BPKP

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai IEPK hasil dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Realisasi nilai IEPK BPKP tahun 2023 sebesar 4 atau mencapai 133,33% dari target tahun 2023 sebesar 3,00.



Grafik 3.6. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 6.1 Tahun 2020-2023

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain:

1. Melaksanakan Sosialisasi Aturan Perilaku dan Penanganan Pengaduan, Risiko Hukum dan Reputasi, serta PP 94 Tahun 2021 dan *Focus Group Discussion* (FGD) Pemberian Perlindungan dan Penghargaan bagi Pelapor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
2. Melaksanakan sosialisasi Aturan Perilaku Pegawai BPKP dalam bentuk infografis pada aplikasi MAP;
3. Melaksanakan identifikasi fraud risik Unit Kerja, Hambatan Pengawasan APP Tematik, dan Pembahasan Kebijakan Perlindungan Pelapor;
4. Melaksanakan reuiu penilaian risiko fraud Unit Kerja di Lingkungan BPKP Tahun 2023;
5. Melaksanakan pemantauan penerapan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor OT.06/S-1532/SU/01/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Identifikasi serta *Updating* Risiko *Fraud*.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan:

1. Penyempurnaan Pedoman Evaluasi Implementasi atas Kebijakan *Anti Fraud* Unit Kerja.
2. Penyusunan konsep Keputusan Kepala/Sekretaris Utama BPKP terkait perlindungan dan pemberian penghargaan bagi pelapor.
3. Workshop penguatan infrastruktur kebijakan anti korupsi (Pejabat Penerimaan Pengaduan dan Petugas Penerima Laporan Penerimaan Gratifikasi) Unit Kerja.
4. *Surveillance* SMAP ISO 37001:2016 Inspektorat.
5. Penyempurnaan Portal E-Lapor Gratifikasi dan Portal *Whistleblowing System*.

Capaian Sasaran Kegiatan 6 sebesar 133,33% atau telah mencapai target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp337.184.700,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp337.396.000,00 dengan IOK sebanyak tujuh laporan atau 100% dari rencana *output* sebanyak tujuh laporan, serta kebutuhan OH sebanyak 565 OH atau 106,00% dari rencana sebanyak 533 OH.

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan diukur dengan satu IKK dengan capaian 100,00% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 7

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
VII	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan					
7.1	Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016	Persen	100	100,00	100,00	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7					100,00	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan sebagai berikut:

IKK 7.1

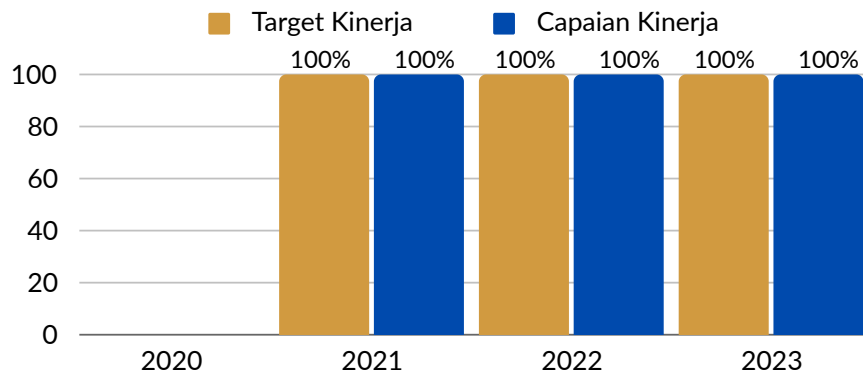
Realisasi Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Perka BPKP Nomor 2/2016 Tahun 2023 sebesar
100%

Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditelaah dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan, dikali 100%.

Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 44 pengaduan yang masuk dan telah selesai ditelaah seluruhnya oleh Inspektorat.

Realisasi persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP Nomor 2/2016 Tahun 2022 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebesar 100%.



Grafik 3.7. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 7.1 Tahun 2020-2023

Tidak terdapat perubahan persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016 dibandingkan tahun 2022.

Selama tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan yang masuk ke Inspektorat BPKP yaitu dengan penugasan telaah, pengumpulan informasi awal (pulinfo), audit khusus, audit ketaatan dan reuiu.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain:

1. Mengalokasikan beban kerja secara proporsional kepada setiap personil tim bidang Penegakan Integritas dan Penanganan Pengaduan (PIPP);
2. Membekali petugas telaah dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Melaksanakan proses penanganan pengaduan mulai dari melakukan telaah hingga audit khusus;
4. Melaksanakan Audit Ketaatan pada Pelaksanaan Kegiatan dengan Bantuan Kedinasan.

Capaian 100% untuk indikator ini merupakan capaian optimum. Untuk mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan:

1. Pemantauan secara berkelanjutan terhadap unit kerja melalui *dashboard* CITRA.
2. Meningkatkan kompetensi pelaksanaan audit khusus melalui kegiatan PPM.
3. Melaksanakan *monitoring* beban kerja personil bidang PIPP.

Capaian Sasaran Kegiatan 7 sebesar 100,00% atau telah mencapai target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp374.350.374,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp374.889.000,00 dengan IOK sebanyak 6 laporan atau 100,00% dari rencana *output* sebanyak 6 laporan, serta kebutuhan OH sebanyak 192 OH atau 50,00% dari rencana sebanyak 384 OH.

SASARAN KEGIATAN 8

Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat diukur dengan satu IKK dengan capaian 101,75% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 8

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
VIII	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat					
8.1	Skor Kapabilitas Inspektorat	Nilai	4	4,07	101,75	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8					101,75	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat sebagai berikut:

IKK 8.1 Skor Kapabilitas Inspektorat

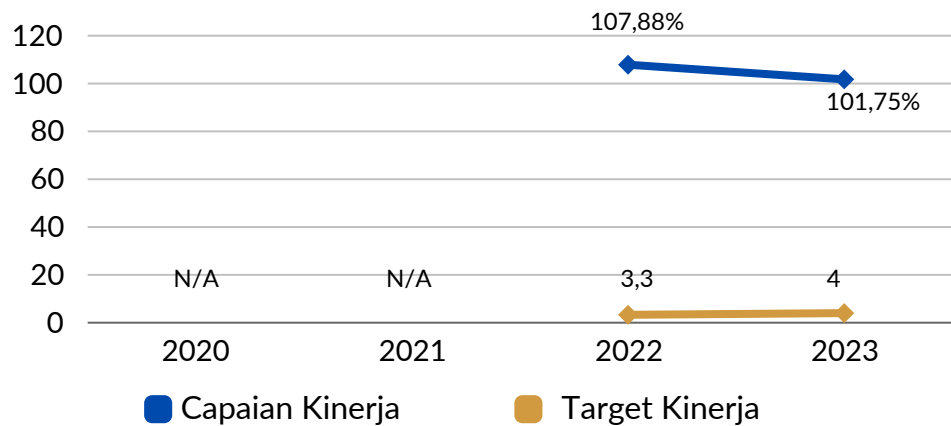
Realisasi Skor Kapabilitas Inspektorat tahun 2023 sebesar 4,07 atau mencapai 101,75%

Indikator kinerja ini diukur dengan penilaian atas lima elemen kapabilitas APIP pada komponen dukungan pengawasan (*enabler*), dan satu elemen kapabilitas pada komponen aktivitas pengawasan (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*).

Realisasi Skor Kapabilitas Inspektorat tahun 2023 sebesar 4,07 atau mencapai 101,75% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 4. Capaian indikator diperoleh dari hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat menggunakan parameter penilaian sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat tahun 2023 dituangkan pada Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Mandiri Nomor PR.02/LHP-392/IN/2/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Skor kapabilitas Inspektorat belum dapat dibandingkan capaiannya target akhir Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2022 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin dari realisasi tahun 2022 sebesar 3,56.

Target kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target tahun 2022, sehingga meskipun realisasi kinerja mengalami kenaikan, dari sisi capaian mengalami penurunan sebesar 6,13% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 107,88%.



Grafik 3.8. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 8.1 Tahun 2020-2023

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk mencapai target kinerja indikator ini antara lain:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
2. Pengembangan kompetensi auditor sesuai dengan hasil *training needs analysis* dan *gap competency*;
3. Aktif dalam kegiatan organisasi profesi;
4. Menindaklanjuti *area of improvement* atas hasil penilaian sebelumnya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja skor kapabilitas Inspektorat tahun 2024, Inspektorat akan:

1. Melaksanakan rencana aksi atas *area of improvement* hasil penilaian mandiri tahun 2023;
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai Inspektorat mengenai penilaian kapabilitas APIP melalui kegiatan PKS agar setiap pegawai dapat memahami perannya masing-masing dalam proses peningkatan kapabilitas Inspektorat; dan
3. Melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat tahun 2024.

Capaian Sasaran Kegiatan 8 sebesar 101,75% atau telah mencapai target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp292.457.607,00 atau 97,98% dari anggaran sebesar Rp298.476.744,00 dengan Indikator Output Kegiatan (IOK) sebanyak 9 laporan atau 128,57% dari rencana output sebanyak 7 laporan, serta penggunaan SDM sebanyak 751 OH atau 53% dari rencana sebanyak 1417 OH.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat diukur dengan enam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian rata-rata 112,85% yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 9

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
IX	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat					
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	91,97	108,20	●
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	99,12	104,34	●
9.3	Persentase BMN dalam Kondisi Baik	Persen	80	93,68	117,11	●
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	85,10	105,06	●
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	99,69	142,42	●
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100,00	100,00	●
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9					112,85	

Uraian capaian kinerja atas sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat sebagai berikut:

IKK 9.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

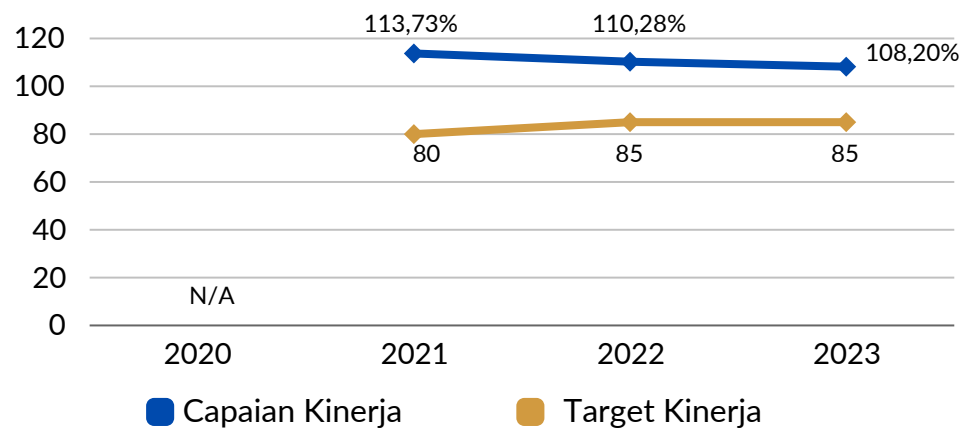
*Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja sebesar **91,97** atau mencapai **108,20%***

Indikator kinerja ini diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah.

Realisasi Skor zona integritas tahun 2023 sebesar 91,97 atau mencapai 108,20% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 85. Capaian indikator diperoleh dari hasil evaluasi internal atas penilaian mandiri pembangunan zona integritas setelah memperoleh predikat WBK pada tahun 2023.

Realisasi skor zona integritas tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,77 dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan realisasi sebesar 93,74 dari target 85.

Penurunan capaian indikator tersebut pada tahun 2023 disebabkan masih kurangnya komitmen pegawai Inspektorat BPKP dalam membangun ZI yang berdampak kepada *stakeholder* Inspektorat. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 79, capaian indikator ini sudah mencapai 116,42%.



Grafik 3.9. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.1 Tahun 2020-2023

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan:

1. Melakukan penyegaran personel satuan tugas pembangunan zona integritas dan satuan tugas budaya kerja;
2. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI dengan memuat target prioritas yang relevan dengan pembangunan ZI;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja; dan
4. Mengukur kebermanfaatan inovasi yang dibangun.

IKK 9.2 Skor IKPA Unit Kerja

Realisasi Skor IKPA tahun 2023 sebesar 99,12 atau mencapai 104,34%

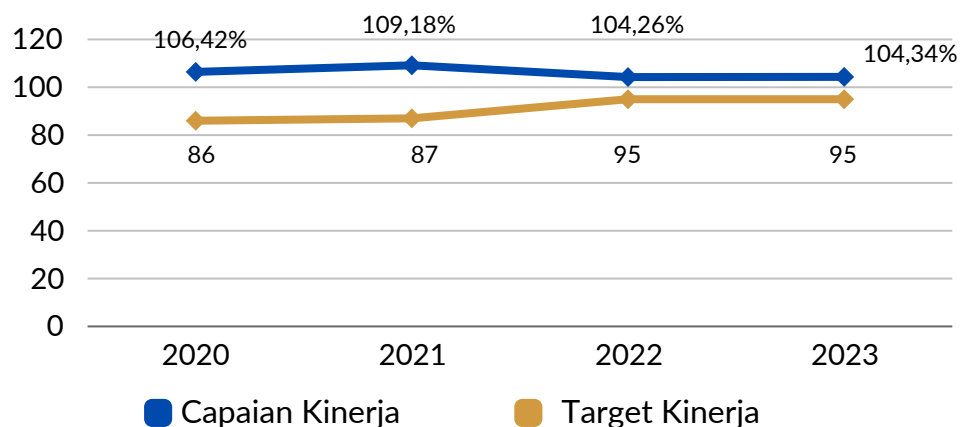
Indikator kinerja ini diukur berdasarkan skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Realisasi Skor IKPA tahun 2023 sebesar 99,12 atau mencapai 104,34% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 95. Capaian kinerja indikator skor IKPA didukung oleh:

1. Komitmen dari pimpinan atas pencapaian IKPA;
2. Komitmen dari para koordinator pengawasan dalam membuat perencanaan penyerapan anggaran per triwulan dan merealisasikannya;
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran;
4. Pemahaman yang baik atas penilaian tiap-tiap indikator IKPA, sehingga dapat disusun strategi yang mendukung pencapaiannya; dan
5. Pemantauan secara berkala atas capaian nilai IKPA serta pengelolaan anggaran.

Realisasi skor IKPA tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,07 dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan realisasi sebesar 99,05 dari target 95.

Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, indikator skor IKPA mencapai 110,13%.



Grafik 3.10. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.2 Tahun 2020-2023

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan:

1. Meng-*update* informasi terkait regulasi terbaru terkait pencapaian IKPA;
2. Mempelajari indikator penilaian IKPA tahun 2024 dan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai melalui sosialisasi IKPA; dan
3. Meningkatkan koordinasi dalam mencapai target penyerapan anggaran per triwulan beserta capaian *output*-nya.

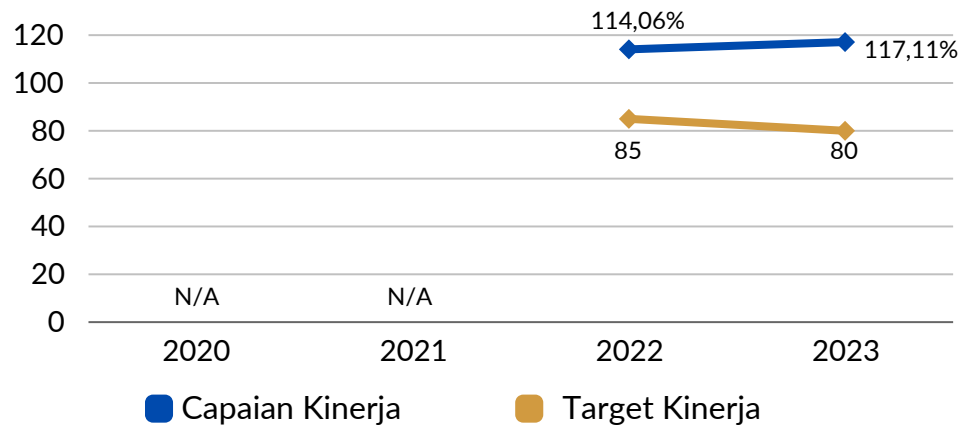
IKK 9.3 Persentase BMN dalam Kondisi Baik

*Realisasi Persentase BMN dalam Kondisi Baik tahun 2023 sebesar **93,68%** atau mencapai **117,11%***

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah BMN dalam kondisi baik di neraca dibagi dengan jumlah seluruh BMN di neraca dikali 100%. Realisasi persentase BMN dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 93,68 atau mencapai 117,11% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 80. Capaian kinerja indikator persentase BMN dalam kondisi baik didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola BMN, sehingga seluruh aset tetap yang tercatat di neraca dapat ditelusuri keberadaannya dan aset tetap dalam kondisi rusak berat telah dilakukan proses penghapusan. Selain itu, pengelolaan BMN juga didukung dengan anggaran pemeliharaan yang cukup memadai baik untuk pemeliharaan aset dalam kondisi rusak ringan maupun aset dalam kondisi baik.

Realisasi persentase BMN dalam kondisi baik tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,27% atau 3,05% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 96,95% dari target 85%.

Penurunan disebabkan bertambahnya aset dengan kategori rusak ringan sebanyak 42 unit.



Grafik 3.11. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.3 Tahun 2020-2023

Indikator kinerja persentase BMN dalam kondisi baik belum dapat diperbandingkan dengan target Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2022 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat.

Untuk mempertahankan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan pemutakhiran data atas kondisi aset tetap Inspektorat BPKP.

IKK 9.4

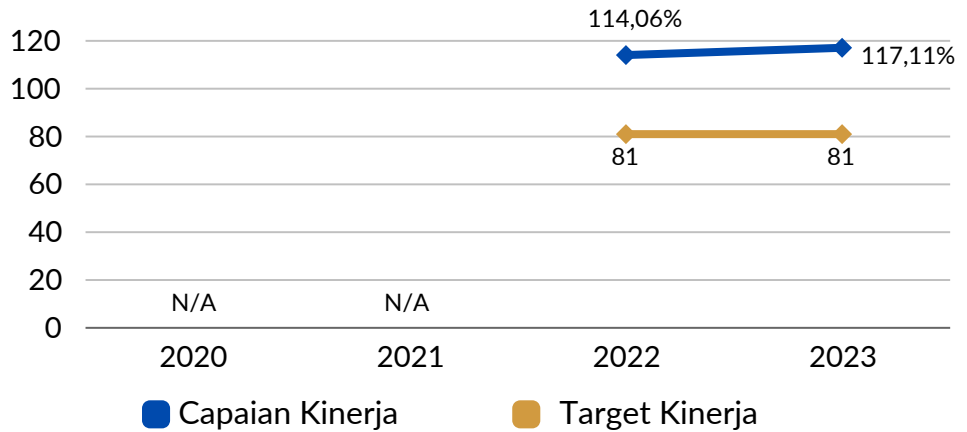
Realisasi nilai SAKIP tahun 2023 sebesar **85,10** atau mencapai **105,06%**

Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini diukur dari nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat, atau hasil penilaian mandiri.

Realisasi nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 85,10 atau mencapai 105,06% dibandingkan target tahun 2023 sebesar 81. Realisasi nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim Inspektorat. Capaian kinerja indikator skor SAKIP didukung oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditargetkan, serta baiknya koordinasi dan sinergi antar bidang dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, dilakukan juga pemantauan target secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan.

Realisasi nilai SAKIP tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,10 atau 0,12% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 85,00 dari target 81. Capaian kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 mencapai 101,31%.



Grafik 3.12. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.4 Tahun 2020-2023

Untuk mempertahankan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi realisasi perjanjian kinerja, monitoring capaian *output* PKPT dan monitoring realisasi anggaran secara berkala.

IKK 9.5

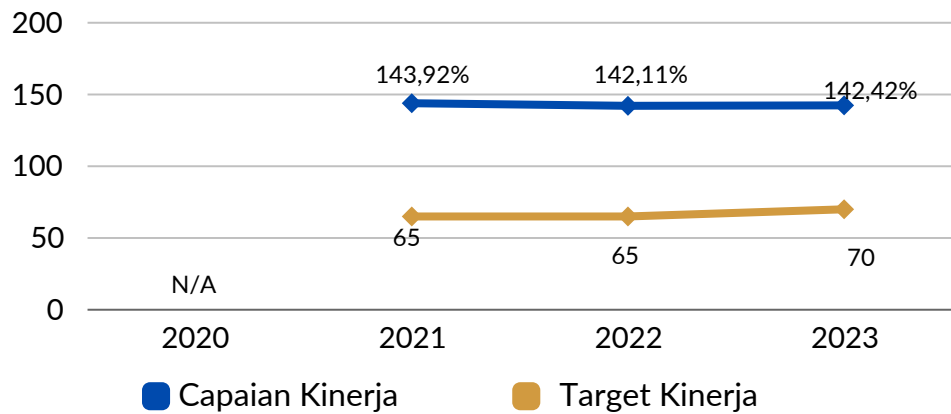
Realisasi Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) tahun 2023 sebesar 99,69% atau mencapai 142,42%

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Indikator kinerja ini diukur dari jumlah *existing control* dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang berhasil memitigasi risiko dibagi dengan jumlah *existing control* dan RTP dikali 100%.

Pada tahun 2023, terdapat 327 *existing control* dan RTP yang diinput pada aplikasi *Risk Management Integrated System (RMIS)*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 326 *existing control* dan RTP secara efektif berhasil memitigasi risiko yang dikelola selama tahun 2023. Sehingga, realisasi persentase efektivitas pengendalian intern tahun 2023 sebesar 99,69% atau mencapai 142,42% dari target tahun 2023 sebesar 70%. Capaian kinerja indikator ini didukung dengan komitmen para pihak dalam melaksanakan rencana tindak pengendalian, serta pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan informasi risiko sehingga berhasil mencegah terjadinya risiko.

Capaian persentase efektivitas pengendalian intern tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,31% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 92,37% dari target 65%.



Grafik 3.13. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.5 Tahun 2020-2023

Indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern belum dapat diperbandingkan dengan target Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat.

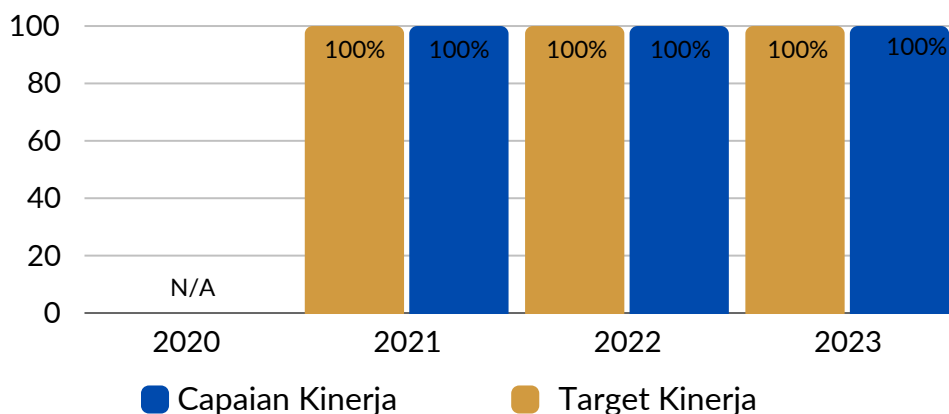
Untuk mempertahankan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan pemantauan efektivitas pengendalian dan rencana tindak pengendalian secara berkala.

IKK 9.6 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

*Realisasi Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2023 sebesar **100%** atau mencapai **100%***

Indikator kinerja ini diukur dari jumlah realisasi RTP yang diselesaikan dibandingkan dengan seluruh RTP yang ditetapkan. Berdasarkan laporan penyelenggaraan MR triwulan IV tahun 2023, jumlah risiko prioritas Inspektorat sebanyak satu risiko dengan satu RTP. Sehingga, realisasi dan capaian persentase penyelesaian RTP tahun 2023 sebesar 100% dari target tahun 2023.

Realisasi persentase penyelesaian RTP tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%.



Grafik 3.14. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKK 9.6 Tahun 2020-2023

Indikator persentase penyelesaian RTP tahun 2023 belum dapat diperbandingkan dengan target Renstra tahun 2024 disebabkan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021 dan belum dilakukan proses revisi indikator kinerja beserta targetnya pada Renstra Inspektorat.

Untuk mempertahankan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024, Inspektorat akan melakukan pemantauan pelaksanaan rencana tindak pengendalian secara berkala.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 9 sebesar 112,85% atau telah mencapai target tahun 2023. Capaian tersebut menggunakan dana sebesar Rp9.810.910.022,00 atau 99,58% dari anggaran sebesar Rp9.852.427.000,00 dengan Indikator *Output* Kegiatan (IOK) sebanyak tiga layanan atau 100,00% dari rencana *output* sebanyak tiga layanan.

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 tidak terlepas dari mitigasi risiko yang telah dilakukan. Risiko utama yang dikelola per sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Risiko Utama Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Risiko yang dikelola
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> Informasi hasil pengawasan tidak strategis Kegiatan pengawasan terlambat dieksekusi Kurangnya analisis/pemahaman terhadap proses bisnis
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penugasan berlarut-larut Pedoman Pengawasan Memiliki Mutu Dibawah Ekspektasi Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan pengendalian tidak dilaksanakan Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Internal/Sistem Pengendalian Internal Adanya resistensi pegawai terhadap perubahan
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	Pegawai menerima suap terkait hasil pengawasan intern
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	<ul style="list-style-type: none"> Auditor tidak dapat menemukan akar permasalahan korupsi pada organisasi Peraturan BPKP tidak tersosialisasikan ke publik
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dalam pengaduan masyarakat tidak didukung kecukupan informasi Auditor tidak dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang mungkin terjadi Informasi (survei, kuesioner, observasi, dsb) yang diperoleh dari pihak terkait (mitra kerja, masyarakat, dll) tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya
8	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>quality assurance</i> terhadap penugasan belum optimal Kegiatan pengawasan terlambat dieksekusi
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> Pemindahan aset tanpa persetujuan Pelaporan GDN tidak akurat Pertanggungjawaban keuangan mengalami keterlambatan

C. CAPAIAN KINERJA OUTPUT

Sesuai dengan target output yang tertuang pada dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2023, target *output* pengawasan Inspektorat sebanyak 72 laporan hasil pengawasan dan tiga layanan dukungan pengawasan.

Realisasi *output* pengawasan Inspektorat Tahun 2023 sebanyak 83 laporan hasil pengawasan atau mencapai 115,28% dibandingkan target tahun 2023. Capaian *output* tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,09 dari capaian tahun 2022 sebesar 106,19%.

Sementara *output* dukungan pengawasan mencapai 100% dari target tahun 2023. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2022.

Rincian realisasi *output* per sasaran kegiatan beserta perbandingan dengan tahun sebelumnya tersaji pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Inspektorat tahun 2023 adalah sebesar Rp12.263.101.095,00 atau terserap 99,11% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp12.373.697.000,00. Rincian per sasaran kegiatan dan berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel-tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	758.781.000	758.780.787	100
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	128.359.000	128.358.925	100
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	403.449.256	342.822.323	84,97
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	107.722.000	106.040.914	98,44

Sasaran Kegiatan		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	-	-	-
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	337.396.000	337.184.700	99,94
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	374.889.000	374.350.374	99,86
8	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat	298.476.744	292.457.607	97,98
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	9.852.427.000	9.810.910.022	99,58
Bahan dan ATK Pengawasan		112.197.000	112.195.443	100
Total		12.373.697.000	12.263.101.095	99,11

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.899.761.000	8.865.652.199	99,62
Belanja Barang	3.344.500.000	3.268.088.896	97,72
Belanja Modal	129.436.000	129.360.000	99,94
Total	12.373.697.000	12.263.101.095	99,11

E. ANALISIS EFISIENSI

Capaian kinerja *outcome* seluruh sasaran kegiatan pada tahun 2023 sebesar 106,01% dan capaian kinerja *output* seluruh sasaran kegiatan sebesar 117,81% didukung dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp12.263.101.095,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp12.373.697,000,00, dan SDM sebanyak 5.824 OH atau 103,69% dari rencana sebanyak 5.617OH.

Capaian rata-rata *outcome* sebesar 106,01% dan *output* sebesar 115,28% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,11% dan penggunaan SDM sebesar 103,69%. Hal ini menunjukkan sasaran kinerja telah efisien dari sisi penggunaan anggaran maupun penggunaan SDM. Rincian analisis efisiensi *output* per sasaran kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

F. KINERJA APEP

Capaian Agenda Prioritas *Enabler* Pengawasan (APEP) tahun 2023 adalah sebesar 100%, yaitu realisasi tiga tema yang terdiri dari lima topik. Tiga tema yang menjadi target APEP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Manajemen kinerja;
2. Metodologi data; dan
3. Sarana prasarana.

Ketiga tema APEP tersebut diturunkan dalam lima topik pengawasan. Untuk menghasilkan informasi hasil yang diharapkan pada masing-masing topik, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, pengawasan atas implementasi manajemen penugasan pengawasan, evaluasi perencanaan dan penganggaran, evaluasi atas kualitas penyelenggaraan manajemen risiko, dan reviu PAPBJ.

Selain APEP, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan yang masuk dalam strategi taktis pada *grand strategy enabler* (GSE). Evaluasi perencanaan dan anggaran, evaluasi atas kualitas implementasi penyelenggaraan manajemen risiko, dan pengawasan atas implementasi manajemen penugasan pengawasan merupakan APEP yang juga masuk dalam GSE.

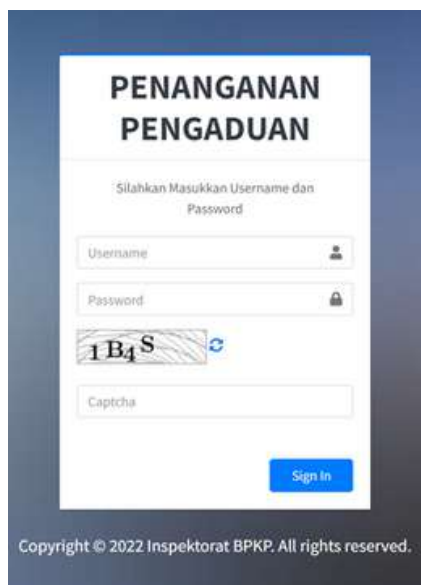
Rincian hasil pengawasan APEP dan GSE tersaji pada Lampiran 5.

G. KINERJA LAINNYA

KINERJA PENTING YANG DIHASILKAN OLEH INSPEKTORAT BPKP, NAMUN TIDAK MENJADI BAGIAN DARI PERJANJIAN KINERJA

a. Aplikasi Penanganan Pengaduan

Inspektorat berinovasi sekaligus merespon kebutuhan Biro Sumber Daya Manusia terkait *database track record* pegawai BPKP yang pernah diadakan/diperiksa dengan mengembangkan aplikasi Penanganan Pengaduan. Aplikasi tersebut menampilkan informasi mengenai proses penanganan pengaduan dimulai dari tahap penerimaan pengaduan oleh Pejabat Penerima Pengaduan, pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, hingga proses dokumentasinya. Informasi lain yang ditampilkan yaitu daftar pegawai yang telah selesai diproses penanganan pengaduannya beserta simpulan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan. *Database* selanjutnya digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam keputusan terkait mutasi dan promosi pegawai.



b. Studi Banding dan *Sharing Knowledge* dengan K/L/P Lain

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat secara aktif berperan sebagai narasumber kegiatan pengawasan, *sharing knowledge*, tempat studi banding dan tempat bertanya bagi unit kerja di BPKP maupun Inspektorat/Inspektorat Jendral K/L/P lainnya seperti BPK, Kemenko PMK, KKP, LAN, BSSN, BPOM, Pemkot Bandung, Pemkab Berau, Pemkab Kutai Kertanegara, dan lainnya.



c. Telaah Sejawat Eksternal pada Inspektorat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam rangka meningkatkan praktik profesional auditor, Inspektorat BPKP berkomitmen untuk terlibat aktif dalam kegiatan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Keterlibatan Auditor Inspektorat BPKP dalam AAIPI tidak hanya sebagai pengurus asosiasi, namun juga terlibat dalam kegiatan telaah sejawat terhadap APIP lain dalam rangka menilai tingkat kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar.

Tahun 2023 ini, Inspektorat BPKP diberikan kesempatan untuk melakukan telaah sejawat terhadap Inspektorat BSSN. Dalam kegiatan ini, Inspektorat BPKP sebagai Tim Penelaah melakukan penilaian terhadap standar atribut dan standar pelaksanaan serta efektivitas pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat BSSN selama periode 2021 s.d 2023.



d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Inspektorat BPKP telah melaksanakan monitoring TL atas hasil rekomendasi BPK. Dari 567 rekomendasi, sebanyak 552 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau mencapai 96,5%.

PENGHARGAAN/APRESIASI YANG DIBERIKAN INSTANSI LAIN DI LUAR BPKP KEPADA INSPEKTORAT BPKP

IKPA TERBAIK SEMESTER I TA 2023

Inspektorat BPKP meraih penghargaan IKPA terbaik semester I TA 2023 untuk kategori pagu sedang di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) IV Jakarta.



SERTIFIKAT SMAP SNI ISO 37001:2016

Hasil assessment independen oleh PT. TUV NORD Indonesia, Inspektorat BPKP berhasil mempertahankan Sertifikasi SMAP untuk lingkup "seluruh kegiatan pengawasan internal dan layanan dukungan termasuk didalamnya pengadaan barang dan jasa" di lingkungan Inspektorat BPKP.



PENGHARGAAN INTERNAL YANG DITERIMA INSPEKTORAT TAHUN 2023

KEARSIPAN

Inspektorat BPKP meraih penghargaan Unit Pengolah Arsip dengan Kategori "Sangat Baik".



LAPORAN KEUANGAN

Inspektorat BPKP meraih penghargaan Juara 2 Best Performance Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023.





PENUTUP

Laporan kinerja (LKj) merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang dibangun dari hasil integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat menyusun Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban kinerja Inspektorat dalam mencapai sasaran kegiatan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 melalui perbandingan realisasi dengan target dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023, secara keseluruhan rerata capaian kinerja Inspektorat sebesar 106,01% dengan rincian rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan utama sebesar 105,15% dan rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan dukungan sebesar 112,85%.

Capaian kinerja Inspektorat tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung seperti:

1. Komitmen pimpinan unit kerja beserta semua jajarannya dan seluruh pegawai untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat;
2. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Biro-biro selaku lini kedua;
3. Komitmen dari pegawai untuk melaporkan harta kekayaannya secara tepat waktu;
4. Adanya komunikasi yang efektif dengan unit kerja; dan
5. Pengembangan kompetensi pegawai secara berkala untuk memenuhi kebutuhan penugasan pengawasan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tahun 2024, Inspektorat BPKP akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan lini kedua dan unit kerja BPKP yang menjadi Klien dan/atau Entitas Mitra Inspektorat. Selanjutnya, upaya peningkatan kompetensi akan lebih intensif dilakukan dengan memperhatikan *gap* kompetensi dan kebutuhan kompetensi sesuai dengan kompleksitas penugasan agar Inspektorat mampu memberikan rekomendasi strategis dan *early warning* dalam setiap penugasan pengawasan.

KILAS PERISTIWA

Januari 2023



April 2023



Februari 2023



Mei 2023



Maret 2023



Juni 2023



Juli 2023



Inspektorat melaksanakan Audit Pisah Batas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

November 2023



Inspektorat melaksanakan Pengawasan atas Pembangunan Smart Building Balai Diklat dalam Rangka Kegiatan Review Mission STAR AF yang Dilaksanakan oleh ADB.

Agustus 2023



Inspektorat memperoleh Penghargaan IKPA Terbaik Pertama Semester I Tahun 2023.

Desember 2023



Pelaksanaan Audit Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

September 2023



Supervisi atas pelaksanaan kegiatan audit kinerja dan Sharing Session "Etik Perilaku Pegawai" pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

Oktober 2023



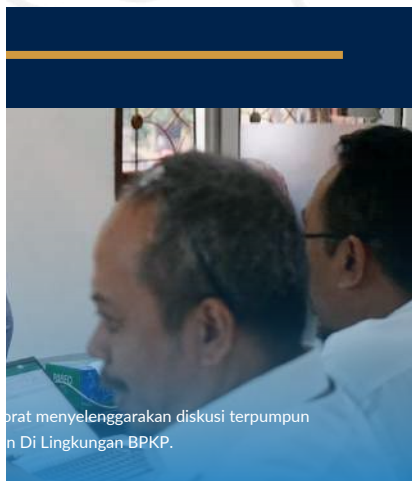
Inspektorat BPKP Berhasil Mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016.



dampingan komunikasi pada abaya RIN.



omunikasi atas Aplikasi SIBIJAK dan SIMDIKLAT bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Selasa (16/05/2023)



orator menyelenggarakan diskusi terpumpun n Di Lingkungan BPKP.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**TARGET DAN REALISASI OUTCOME
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM (OH)		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70,00	73,26	104,65	758.781.000,00	758.780.787,00	100,00	1.742,00	1.510,00	86,68
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 1						104,65	758.781.000,00	758.780.787,00	100,00	1.742,00	1.510,00	86,68
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	128.359.000,00	128.358.925,00	100,00	670,00	1.389,00	207,31
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 2						100,00	128.359.000,00	128.358.925,00	100,00	670,00	1.389,00	207,31
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35,00	35,20	100,58	403.449.256,00	342.822.323,00	84,97	544,00	931,00	171,14
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 3						100,58	403.449.256,00	342.822.323,00	84,97	544,00	931,00	171,14
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75,00	75,68	100,90	107.722.000,00	106.040.914,00	98,44	212,00	426,00	200,94
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 4						100,90	107.722.000,00	106.040.914,00	98,44	212,00	426,00	200,94
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100,00	100,00	100,00	-	-	0,00	115,00	60,00	52,17
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 5						100,00	-	-	0,00	115,00	60,00	52,17
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3,00	4,00	133,33	337.396.000,00	337.184.700,00	99,94	533,00	565,00	106,00
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 6						133,33	337.396.000,00	337.184.700,00	99,94	533,00	565,00	106,00
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100,00	100,00	100,00	374.889.000,00	374.350.374,00	99,86	384,00	192,00	50,00
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 7						100,00	374.889.000,00	374.350.374,00	99,86	384,00	192,00	50,00
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4,00	4,07	101,75	298.476.744,00	292.457.607,00	97,98	1.417,00	751,00	53,00
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 8						101,75	298.476.744,00	292.457.607,00	97,98	1.417,00	751,00	53,00
Total Pengawasan						105,15	2.409.073.000,00	2.339.995.630,00	97,13	5.617,00	5.824,00	103,69
Bahan dan ATK Pengawasan							112.197.000,00	112.195.443,00	100,00	-		

**TARGET DAN REALISASI *OUTCOME*
 INSPEKTORAT BPKP
 TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM (OH)		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85,00	91,97	108,20	197.780.000,00	190.805.860,00	96,47			
		Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95,00	99,12	104,34	9.525.211.000,00	9.490.744.162,00	99,64			
		Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	80,00	93,68	117,11						
		Nilai SAKIP	Nilai	81,00	85,10	105,06						
		Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70,00	99,69	142,42						
		Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100,00	100,00	100,00	129.436.000,00	129.360.000,00	99,94			
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 9						112,85	9.852.427.000,00	9.810.910.022,00	99,58			
Total Dukungan Manajemen							9.852.427.000,00	9.810.910.022,00	99,58			
Total Anggaran						106,01	12.373.697.000,00	12.263.101.095,00	99,11			

PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Kinerja Kegiatan														Target 2024	% realisasi terhadap tahun 2024	
			Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun)	Realisasi 2021	Naik (Turun)	Realisasi 2020	Naik (Turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik (Turun)	Capaian 2021	Naik (Turun)	Capaian 2020			Naik (Turun)
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	1.1 Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	73,26	89,88	-16,62	100,00	-26,74	93,03	-19,77	104,65	128,40	-23,75	100,00	4,65	93,03	11,62	100,00	73,26
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 1				73,26	89,88	-16,62	100,00	-26,74	93,03	-19,77	104,65	128,40	-23,75	100,00	4,65	93,03	11,62	100,00	73,26
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	2.1 Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	95,17	4,83	13,54	86,46	N/A	N/A	100,00	105,74	-5,74	67,70	32,30	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 2				100,00	100,00	0,00	13,54				100,00	105,74	-5,74	67,70	32,30			0,00	0,00
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	3.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35,20	75,00	-39,80	50,37	-15,17	N/A	N/A	100,58	214,29	-113,71	143,91	-43,33	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 3				35,20	75,00	-39,80	50,37				100,58	214,29	-113,71	143,91	-43,33			0,00	0,00
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	4.1 Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75,68	100,00	-24,32	76,47	-0,79	N/A	N/A	100,90	133,33	-32,43	101,96	-1,06	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 4				75,68	100,00	-24,32	76,47				100,90	133,33	-32,43	101,96	-1,06			0,00	0,00
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	5.1 Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 5				100,00	100,00	0,00	100,00				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			0,00	0,00
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	6.1 Indeks IEPK BPKP	Nilai	4,00	3,70	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	133,33	123,33	10,00	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 6				4,00	3,70	0,30					133,33	123,33	10,00					0,00	0,00
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	7.1 Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 7				100,00	100,00	0,00	100,00				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			0,00	0,00
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	8.1 Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4,07	3,56	0,51	N/A	N/A	N/A	N/A	101,75	107,88	-6,13	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 8				4,07	3,56	0,51					101,75	107,88	-6,13					0,00	0,00
9	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	9.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	91,97	93,74	-1,77	90,98	0,99	N/A	N/A	108,20	110,28	-2,08	113,73	-5,53	N/A	N/A	79,00	116,42
		9.2 Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	99,12	99,05	0,07	94,99	4,13	91,52	7,60	104,34	104,26	0,08	109,18	-4,84	106,42	-2,08	90,00	110,13
		9.3 Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	93,68	96,95	-3,27	N/A	N/A	N/A	N/A	117,11	114,06	3,05	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA
		9.4 Nilai SAKIP	Nilai	85,10	85,00	0,10	81,44	3,66	82,97	2,13	105,06	104,94	0,12	100,54	4,52	103,71	1,35	84,00	101,31
		9.5 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	99,69	92,37	7,32	93,55	6,14	N/A	N/A	142,42	142,11	0,31	143,92	-1,50	N/A	N/A	NA	NA
		9.6 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	N/A	N/A	NA	NA
Capaian Rata-Rata Sasaran Kegiatan 9				94,93	94,52	0,41	92,19				112,85	112,61	0,25	113,47	-0,62	105,07	7,79	84,33	109,29

**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Rerata Capaian Saskeg	Rincian Output (RO)		Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
		Kode RO	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisiensi (9≥12)	Belum efisien (9<12)	Efisiensi (9≥15)	Belum efisien (9<15)
1	2	3	4	5	6	7	9=7/6	10	11	12=11/10	13	14	15=14/13	16	17	18	19
1 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal	104,65	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	15	17	113,33	738.703.000,00	738.702.787,00	100,00	1526	1138	74,57	Efisien	-	Efisien	-
		EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	Laporan	2	3	150,00	20.078.000,00	20.078.000,00	100,00	154	285	185,06	Efisien	-	-	Belum Efisien
		EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00	62	87	140,32	Efisien	-	-	Belum Efisien
Jumlah Sasaran Kegiatan 1					18	21	116,67	758.781.000,00	758.780.787,00	100,00	1.742	1.510	86,68	Efisien	-	Efisien	-
2 Meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	100,00	EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	15	19	126,67	128.359.000,00	128.358.925,00	100,00	670	1389	207,31	Efisien	-	-	Belum Efisien
Jumlah Sasaran Kegiatan 2					15	19	126,67	128.359.000,00	128.358.925,00	100,00	670	1.389	207,31	Efisien	-	-	Belum Efisien
3 Meningkatkan efektivitas pengendalian internal BPKP	100,58	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	13	13	100,00	343.591.000,00	282.964.287,00	82,35	430	859	199,77	Efisien	-	-	Belum Efisien
		EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	2	2	100,00	59.858.256,00	59.858.036,00	100,00	114	72	63,16	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah Sasaran Kegiatan 3					15	15	100,00	403.449.256,00	342.822.323,00	84,97	544	931	171,14	Efisien	-	-	Belum Efisien
4 Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	100,90	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	4	200,00	107.722.000,00	106.040.914,00	98,44	212	426	200,94	Efisien	-	-	Belum Efisien
Jumlah Sasaran Kegiatan 4					2	4	200,00	107.722.000,00	106.040.914,00	98,44	212	426	200,94	Efisien	-	-	Belum Efisien
5 Meningkatkan transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	100,00	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	2	100,00	0,00	0,00	0,00	115	60	52,17	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah Sasaran Kegiatan 5					2	2	100,00	0,00	0,00	0,00	115	60	52,17	Efisien	-	Efisien	-
6 Meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	133,33	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	7	7	100,00	337.396.000,00	337.184.700,00	99,94	533	565	106,00	Efisien	-	-	Belum Efisien
Jumlah Sasaran Kegiatan 6					7	7	100,00	337.396.000,00	337.184.700,00	99,94	533	565	106,00	Efisien	-	-	Belum Efisien
7 Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan	100,00	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	6	6	100,00	374.889.000,00	374.350.374,00	99,86	384	192	50,00	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah Sasaran Kegiatan 7					6	6	100,00	374.889.000,00	374.350.374,00	99,86	384	192	50,00	Efisien	-	Efisien	-

**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Rerata Capaian Saskeg	Rincian Output (RO)		Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM		
		Kode RO	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisiensi (9≥12)	Belum efisien (9<12)	Efisiensi (9≥15)	Belum efisien (9<15)	
1	2	3	4	5	6	7	9=7/6	10	11	12=11/10	13	14	15=14/13	16	17	18	19	
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	101,75	EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	4	5	125,00	32.329.744,00	32.329.744,00	100,00	30	359	1196,67	Efisien	-	-	Belum Efisien
			EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	3	4	133,33	266.147.000,00	260.127.863,00	97,74	1387	392	28,26	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah Sasaran Kegiatan 8					7	9	128,57	298.476.744,00	292.457.607,00	97,98	1.417	751	53,00	Efisien	-	Efisien	-	
Total Pengawasan					72	83	115,28	2.409.073.000,00	2.339.995.630,00	97,13	5.617	5.824	103,69	Efisien	-	Efisien	-	
Bahan dan ATK Pengawasan								112.197.000,00	112.195.443,00	100,00								
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	112,85	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	197.780.000,00	190.805.860,00	96,47				Efisien	-		
			EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	9.525.211.000,00	9.490.744.162,00	99,64				Efisien	-		
			EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00	129.436.000,00	129.360.000,00	99,94				Efisien	-		
			Total Dukungan Manajemen					3	3	100,00	9.852.427.000,00	9.810.910.022,00	99,58				Efisien	-
Total					75	86	114,67	12.373.697.000,00	12.263.101.095,00	99,11				Efisien	-			

**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan		Rincian Output (RO)		Kinerja RO						
		Kode RO	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik (turun)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	17	16	1	113,33	100,00	13,33
		EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	Laporan	3	2	1	150,00	100,00	50,00
		EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	1	4	-3	100,00	100,00	0,00
Jumlah Sasaran Kegiatan 1					21	22	-1	116,67	100,00	16,67
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	19	13	6	126,67	108,33	18,33
Jumlah Sasaran Kegiatan 2					19	13	6	126,67	108,33	18,33
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	13	4	9	100,00	100,00	0,00
		EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	2	7	-5	100,00	116,67	-16,67
Jumlah Sasaran Kegiatan 3					15	11	4	100,00	108,33	-8,33
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	4	3	1	200,00	100,00	100,00
Jumlah Sasaran Kegiatan 4					4	3	1	200,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	1	1	100,00	100,00	0,00
Jumlah Sasaran Kegiatan 5					2	1	1	100,00	100,00	0,00

**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)
 INSPEKTORAT BPKP
 TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan		Rincian Output (RO)		Kinerja RO						
		Kode RO	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik (turun)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	7	4	3	100,00	100,00	0,00
Jumlah Sasaran Kegiatan 6					7	4	3	100,00	100,00	0,00
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	6	8	-2	100,00	100,00	0,00
Jumlah Sasaran Kegiatan 7					6	8	-2	100,00	100,00	0,00
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	5	8	-3	125,00	114,29	10,71
		EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	4	3	1	133,33	100,00	33,33
Jumlah Sasaran Kegiatan 8					9	11	-2	128,57	107,14	21,43
Total Pengawasan					83	73	10	115,28	106,19	9,09
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	EBA.962.	Layanan Umum	Layanan	1	1	0	100,00	100,00	0,00
		EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	100,00	100,00	0,00
		EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	100,00	100,00	0,00
Total Dukungan Manajemen					3	3	0	100,00	100,00	0

**REALISASI KINERJA
AGENDA PRIORITAS ENABLER PENGAWASAN
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023**

NO	Kode APEP/GSE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	AKUMULASI PROGRES TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
1	B.6	Manajemen Kinerja	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP	Analisis ketepatan dan keselarasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Pusat dan Perwakilan; Potret pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP (termasuk saldo TPB dan TPPTD); Analisis kebermanfaatannya rekomendasi hasil pengawasan BPKP; Identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan TLHP BPKP Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi	1. Hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan Tahun 2022 yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 didapati bahwa tindak lanjut hasil pengawasan BPKP belum maksimal. Nilai capaian tindak lanjut kondisi temuan sebesar 26,80% untuk kegiatan non keinvestigasian dan 29,08% untuk kegiatan investigasi, sedangkan untuk tindak lanjut nilai rupiah sebesar 7,33% untuk kegiatan non keinvestigasian dan 1,35% untuk kegiatan investigasi. Hal ini disebabkan belum dilakukannya prosedur pemantauan TL (SP1 dst) serta pelaksanaan tindak lanjut yang belum tuntas. 2. Rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti telah membantu unit kerja untuk mencapai tujuan (contoh: optimalisasi PAD, penyusunan kebijakan untuk pengendalian). 3. Database hasil pengawasan pada aplikasi SIMA belum menggambarkan hasil pengawasan sebenarnya karena penginputan belum tertib.
2	B.7 #3	Manajemen Kinerja	Pengawasan Intern atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan	Perencanaan Pengawasan: 1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan perencanaan kegiatan pengawasan antara Pusat dan Perwakilan; 2. Efektivitas pelaksanaan konvergensi perencanaan kegiatan pengawasan; 3. Analisis ketepatan metodologi pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan; 4. Permasalahan dan hambatan perencanaan kegiatan pengawasan; 5. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi Pelaksanaan Pengawasan: 1. Analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan; 2. Analisis ketepatan penggunaan data dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan; 3. Analisis pelaksanaan reviu berjenjang dalam rangka menjaga kualitas/mutu kegiatan pengawasan; 4. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan pengawasan; 5. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi Pelaporan Hasil Pengawasan: 1. Analisis mutu hasil pengawasan, meliputi: 1) Ketepatan dan keselarasan penyajian simpulan hasil pengawasan berdasarkan data/informasi yang diuji; 2) Relevansi simpulan terhadap rekomendasi yang diberikan; 3) Rekomendasi yang diberikan bersifat implementatif dalam perbaikan kebijakan; 2. Permasalahan dan hambatan pelaporan hasil pengawasan	Telah dilakukan piloting pengawasan atas implementasi MPP secara uji petik pada APP evaluasi percepatan penurunan stunting dan APPD evaluasi tata kelola hilirisasi perkebunan tebu Provinsi Jawa Timur. Tujuan pengawasan untuk memperoleh gambaran kualitas implementasi penugasan pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut. Dari hasil piloting tersebut diperoleh kondisi sebagai berikut: Perencanaan 1. Rendal APP topik evaluasi penurunan percepatan stunting telah menyusun perencanaan pengawasan dengan lingkup program kerja yang harus dilaksanakan oleh PJ, kontributor pusat dan kontributor Perwakilan. Namun, pelaksanaan pengawasan di level Perwakilan tidak memperhatikan kembali hal tersebut. Seluruh program kerja baik yang menjadi ranah rendal PJ maupun kontributor pusat dimasukkan ke dalam program kerja tim Perwakilan. 2. Perumusan tujuan dan sasaran pengawasan belum mengarah pada permasalahan prioritas. (APPD) 3. Perumusan tujuan pengujian pada setiap Tentative Evaluation Objective (TEO) belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama (APPD) 4. Program kerja yang disusun belum sepenuhnya menyajikan langkah kerja pengujian substansi dengan tepat (APPD) Pelaksanaan APP dan APPD 1. Data/informasi yang diperoleh belum cukup, andal dan relevan untuk mencapai tujuan pengawasan. 2. Analisis data yang dilakukan tidak cukup andal untuk menghasilkan simpulan 3. Penarikan simpulan belum berdasarkan hasil analisis atas pengujian yang dilakukan serta belum didukung dengan kertas kerja yang memadai Komunikasi hasil pengawasan hasil pengawasan APPD yang diujipetik tidak dibahas dengan klien sehingga: 1. terdapat rumusan rekomendasi pada Pemerintah Daerah yang kurang tepat, seperti rekomendasi penyusunan kebijakan penurunan suku bunga pinjaman yang bukan menjadi ranah pemerintah daerah 2. Tidak terdapat berita acara kesepakatan hasil pengawasan dengan klien. Secara umum permasalahan yang diuraikan di atas disebabkan unit kerja belum menjalankan prosedur pengawasan yang memadai sesuai standar pengawasan, serta pemahaman setiap personil tim dalam menjalankan prosedur tersebut. Selain itu, proses supervisi atau reviu berjenjang belum dilaksanakan secara efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengkomunikasian hasil penugasan
3	B.8 #14	Manajemen Kinerja	Prioritasi Penggunaan Anggaran	Pemanfaatan anggaran berfokus pada prioritas organisasi: 1. Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; 2. Potensi efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran; 3. Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran; 4. Potensi ketercapaian tujuan pada sektor prioritas pengawasan; 5. Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran; 6. Rekomendasi perbaikan	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: Penganggaran yang disusun oleh unit kerja di BPKP telah melalui pembahasan antara Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, Biro Keuangan, Inspektorat dan Unit Perencana dan Pengendali pada Kedepuitan telah memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.01/S-632/SU/01/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Usulan Penyesuaian Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023. Berdasarkan surat edaran tersebut alokasi anggaran yang telah tersedia di DIPA unit kerja memprioritaskan anggaran pengawasan untuk pemenuhan target kinerja dan informasi hasil pengawasan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKP. Namun terdapat potensi kegiatan yang tidak efektif sebesar 2.018 PKPT dari total 4.911 PKPT atau sebesar 41,09%. Sedangkan dari segi anggaran, ada potensi inefisiensi terhadap 284 PKPT yang berpotensi tidak terealisasi atau sebesar Rp7.857.935.000,00 dari Rp519.307.762.000,00 total anggaran CH-Pengawasan Tahun 2023.

**REALISASI KINERJA
AGENDA PRIORITAS ENABLER PENGAWASAN
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2023**

NO	Kode APEP/GSE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	AKUMULASI PROGRES TAHUN 2023
4	C.6 #30,#33	Metodologi dan data	Pengelolaan risiko	<ol style="list-style-type: none"> Gambaran kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor prioritas pengawasan (identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko); Analisis efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko terhadap ketercapaian tujuan sektor prioritas pengawasan (APP dan APPD) (termasuk simpulan potensi ketercapaian target sektor prioritas); Identifikasi hambatan penyelenggaraan pengelolaan risiko; Best practice penyelenggaraan pengelolaan risiko pada sektor prioritas; Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional 	<p>Sampai dengan Trw IV/2023 telah dilakukan penjaminan kualitas atas implementasi penyelenggaraan MR pada 6 unit kerja perwakilan BPKP. Dari hasil penjaminan kualitas tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Manajemen Risiko telah comply dengan pedoman penyelenggaraan Manajemen Risiko di BPKP (Perban No. 4/2021), Namun demikian secara kualitas, penyelenggaraan MR pada unit kerja BPKP belum sepenuhnya terselenggara dengan baik. Kondisi penyelenggaraan MR di unit kerja BPKP yang perlu ditingkatkan tersebut meliputi tahapan pengelolaan risiko mulai penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons sampai dengan tahap informasi dan komunikasi, dengan uraian permasalahan di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses penetapan konteks belum dilakukan dengan benar. Ketidakselarasan antara konteks yang ditetapkan dengan rumusan pernyataan risiko dan dampaknya Analisis risiko belum dilakukan dengan tepat Identifikasi akar penyebab dan RTP belum dilakukan dengan tepat Pemantauan kejadian risiko dan efektivitas pengendalian belum dilakukan dengan memadai
5	E.2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> Potret kebijakan dan tata kelola BMN BPKP (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); Potret pengelolaan BMN BPKP (perencanaan sesuai peta kebutuhan sarpras, pengadaan, pencatatan dan pelaporan, serta pengamanan aset); Analisis efektivitas pemanfaatan BMN dalam pemenuhan kebutuhan pengawasan dan peningkatan kinerja 	<p>Hasil Audit atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2023 pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp36.134.921.000 dan realisasi pembayaran sampai dengan terakhir sebesar Rp28.250.938.327.</p> <p>Masih terdapat permasalahan pada proses pembangunan gedung tersebut antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan minus atas progress fisik bangunan yang terlapor pada laporan minggu ke 30 tanggal 10 Desember 2023 dengan hasil cek fisik lapangan per tanggal 13 Desember 2023 oleh tim audit dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan; Pergantian dan pembayaran personil manajemen konstruksi yang tidak sesuai dengan tugas sesuai jadwal <p>Inspektorat BPKP telah merekomendasikan kepala kepala perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan PPK untuk memerintahkan MK dan penyedia untuk melakukan perhitungan yang sesuai dilapangan sesuai dengn kondisi dilapangan dan mempercepat proses pekerjaan; Memperhitungkan kelebihan pembayaran personil dalam sisa tagihan kontrak; <p>Akibat dari ketidaktaatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp426.875.870,24 dan pemanfaatan gedung kantor untuk mendukung kinerja pegawai belum dapat terwujud.</p>
6	#36	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> Analisis keselarasan kebijakan pendidikan dan pelatihan pengawasan/dukungan pengawasan dengan lingkungan strategis; Gambaran sebaran kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan; Analisis pemenuhan kebutuhan dan kompetensi tenaga pengajar; Analisis kesesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan lingkungan strategis; Gambaran jumlah dan sebaran lulusan peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan; Analisis kebermanfaatn hasil pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan terhadap kualitas hasil pengawasan; Permasalahan dan hambatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 	<p>Dari hasil pengawasan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tahun 2023 dengan fokus pengawasan pada diklat Data Science, masih dijumpai beberapa kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diklat yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi namun dalam penyelenggaraannya belum sesuai. Dalam pelaksanaannya, materi yang diajarkan pada diklat Data Science, baik WCDS maupun CDSP, belum berkaitan erat dengan tugas pegawai yang diklatkan. Pelatihan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kelulusan sertifikasi bukan untuk menjawab kebutuhan pegawai BPKP bahwa setelah selesai diklat pegawai mampu menganalisis data pengawasan dengan baik sebagaimana tujuan penyelenggaraan diklat. Selain itu, kerangka acuan kerja (KAK) untuk diklat Data Science baru sebatas formalitas dalam mengajukan no objection letter (NOL) ke Asian Development Bank (ADB) sehingga belum memuat secara rinci mengenai tujuan atas pelaksanaan diklat tersebut. Materi yang diberikan belum sesuai kebutuhan organisasi. Dari hasil wawancara kepada beberapa peserta diklat, materi yang diajarkan pada diklat CDSP tidak berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang dilakukan pada unit kerja. Belum ada kriteria pengajar. Belum terdapat standar kebutuhan sarpras diklat. Penyelenggaraan Pelatihan Data Science belum dapat dimanfaatkan secara memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi unit kerja

**REALISASI KINERJA
 AGENDA PRIORITAS ENABLER PENGAWASAN
 INSPEKTORAT BPKP
 TAHUN 2023**

NO	Kode APEP/GSE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	AKUMULASI PROGRES TAHUN 2023
7	#31	Perlindungan Hukum dan Reputasi	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Pengawasan	1. Kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh Unit Kerja meliputi: - Profil risiko kecurangan tematik; - Profil risiko Hambatan Pengawasan Tematik; 2. Analisis kondisi penanganan pengaduan di BPKP; 3. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan (lesson learned dari pencegahan, deteksi dan respon kecurangan); 4. Rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian hambatan pengawasan	1a) Dari Reviu atas Penilaian Risiko Fraud tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan BPKP diperoleh informasi sebagai berikut: 1) Terdapat 7 unit kerja BPKP yang belum mengidentifikasi risiko fraud. 2) Terdapat 19 pernyataan risiko pada 9 unit kerja yang belum menetapkan konteks sasaran atas risiko fraud yang telah diidentifikasi. 3) Penyataan risiko fraud tidak tepat untuk dimasukan dalam kategori risiko fraud. 4) Kesalahan dalam memberikan kodifikasi pada risiko kategori fraud. 5) Analisis risiko belum mempertimbangkan existing control. 6) Analisis risiko yang dilakukan tidak tepat dalam menentukan signifikansi level kemungkinan dan dampak sehingga tidak tepat dalam menetapkan signifikansi risiko. 7) Unit kerja belum menetapkan RTP secara lengkap untuk semua risiko prioritas. 8) Terdapat 4 unit kerja tidak melakukan analisis RCA/akar penyebab risiko kerja atas 4 pernyataan risiko. 9) Sebanyak 6 unit kerja belum merencanakan periode pelaksanaan RTP atas 21 risiko fraud yang menjadi risiko prioritas. 10) Waktu realisasi RTP belum tepat. Selain itu penyelenggaraan Fraud Risiko Assesment pada APP TW I tahun 2023 juga dilakukan reviu oleh Tim Inspektorat dengan hasil sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan FRA APP yang dilakukan oleh BPKP merupakan risiko fraud kegiatan/program dari obyek pemeriksaan, bukan risiko fraud atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. 2) Hasil FRA APP yang dilakukan BPKP pada program/kegiatan Obyek Pemeriksaan pada TW I dengan kondisi sebagai berikut: (a) Terdapat 21 pernyataan risiko oleh obyek pemeriksaan yang belum dilengkapi uraian dampak. (b) Terdapat 756 pernyataan risiko dengan skor residual risk meningkat dibandingkan skor inherent risk meskipun telah dinyatakan telah dipasang pengendalian dengan uraian "memadai", terjadi pada 27 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (c) Terdapat 5 pernyataan risiko yang belum ada pengendalian terpasang, namun dinyatakan bahwa pengendalian yang dilakukan telah memadai di sisi lain skala residual risk meningkat, terjadi pada 5 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (d) Terdapat 24 pernyataan risiko dengan pengendalian terpasang "tidak memadai" namun tidak membuat rencana tindak pengendaliannya, terjadi pada 4 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (e) Terdapat 63 pernyataan risiko dengan skor 20 atau lebih (signifikansi tinggi) namun tidak membuat rencana tindak pengendaliannya, terjadi pada 8 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (f) Terdapat 3 pernyataan risiko dengan rencana tindak pengendalian namun belum ditentukan penanggung jawab atas rencana mitigasi tersebut, terjadi pada 2 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. 1b) Dari hasil FGD pada salah satu perwakilan diperoleh informasi Identifikasi atas Hambatan Pengawasan APP dengan kondisi sebagai berikut: a. Dari 44 pegawai, sekitar 68% responden memiliki persepsi bahwa tahapan perencanaan APP masih belum memadai. b. Dari 44 pegawai, sekitar 64% responden memiliki persepsi bahwa tahapan penganggaran APP masih belum memadai. c. Dari 44 pegawai, sekitar 50% responden memiliki persepsi bahwa tahapan pelaksanaan APP masih belum memadai. d. Dari 44 pegawai, sekitar 61% responden memiliki persepsi bahwa tahapan pemantauan APP cukup memadai. e. dari 44 pegawai, sekitar 43% responden memiliki persepsi bahwa tahapan pelaporan APP belum memadai. 2. Penerimaan pengaduan periode tahun 2021 s.d 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan. Untuk merespon hal tersebut, Inspektorat berinisiatif melaksanakan diklat MOOC guna meningkatkan kesadaran dari pegawai untuk meningkatkan integritas dan membangun kesadaran untuk melaporkan setiap pelanggaran pegawai. Dan sesuai arahan Kepala BPKP, Inspektorat berkolaborasi dengan Biro SDM dan Biro Hukum dan Komunikasi untuk melakukan sosialisasi untuk penguatan integritas pegawai pada unit kerja. 3. Dari hasil pemantauan perilaku fraud atas pelaksanaan perjalanan dinas dan pelanggaran integritas presensi pegawai telah direkomendasikan perbaikan kebijakan dan perbaikan pengendalian pada aplikasi MAP 4. Inspektorat telah mengirimkan atensi kepada unit penanggung jawab pedoman untuk mempercepat proses penyusunan terhadap pedoman yang terlambat dan melakukan unggah serta tagging pedoman sektor/tema/topik APP ke dalam aplikasi e-Top



Insight to Navigate The Future

Inspektorat BPKP

www.bpkp.go.id/inspektorat.bpkp